PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENGHASILAN, KUALITAS PELAYANAN, KEPERCAYAAN PUBLIK, DAN PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA YOGYAKARTA

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Nama	: Maruf Akbar Nugroho
NIM	: 20312380
Program Studi	: Akuntansi

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENGHASILAN, KUALITAS PELAYANAN, KEPERCAYAAN PUBLIK, DAN PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA YOGYAKARTA

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Maruf Akbar Nugroho

NIM : 20312380

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apa pun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 11 Oktober 2024

Penulis,



Maruf Akbar Nugroho

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENGHASILAN, KUALITAS PELAYANAN, KEPERCAYAAN PUBLIK, DAN PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA YOGYAKARTA

SKRIPSI

Diajukan oleh:

Nama : Maruf Akbar Nugroho

NIM : 20312380

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal, 11 Oktober 2024

Dosen pembimbing,



Reny Lia Riantika, SE., M.Acc., Ak.

MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidaklah menakdirkan sesuatu untuk seorang mukmin melainkan pasti itulah yang terbaik untuknya."

(Hadis Riwayat Ahmad)

"Melamban bukanlah hal yang tabu, kadang itu yang kau butuh bersandar hibahkan bebanmu."

(Perunggu)

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahhirabbil'alamin, dengan mengaturkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT., yang telah memberikan karunia akal sehat dan pikiran, hidayah, kesempatan, rahmat, hingga kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Selawat serta salam tidak pun lupa terjunjung pada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri teladan bagi seluruh umat manusia serta selalu ditunggu syafaatnya hingga akhir zaman. Penelitian yang berjudul "**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Kualitas Pelayanan, Kepercayaan Publik, dan Perkembangan Infrastruktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta**." ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis telah menerima banyak doa, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Maka, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak dan Ibu penulis, Bapak Nur Hadiyanta dan Ibu Surajiyah. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang dan dukungan tiada henti yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga penulis dapat membalas budi kedua orang tua dengan menjadi anak yang membanggakan Bapak dan Ibu.

Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah SWT.

2. Saudari-saudari penulis, Dyah Eka Kurniawati dan Dyah Yulianita Hastuti yang juga memberikan doa, semangat, dan bantuan dalam penyelesaian penelitian ini.
3. Johan Arifin, SE, M.Si, Ph.D, CFrA, CIPSAS selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., SAS, ASPM selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Reny Lia Riantika, SE., M.Acc., Ak. yang berperan sebagai dosen pembimbing skripsi penulis yang dengan penuh kesabaran membimbing, memberi masukan, dan sarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar. Semoga ilmu dan kebaikan yang dicurahkan pada penulis akan selalu membawa keberkahan pada Ibu hingga kapan pun.
6. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu kepada penulis.
7. Sahabat seperjuangan penulis: Rafi Ilham, Aryanto Ramadhani, Ela Amalia, Fajar Qoniah, Anjani Maula, Syahrul Gilang, Syafira Aleyda, Syahra Aleydia, Maharlina Darni, dan juga teman-teman lainnya yang

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga di lain waktu kita masih bisa berjumpa dengan keadaan yang lebih baik.

8. Ainun Nisa Rezika, pribadi istimewa yang tanpa lelah menemani penulis pun selalu memberikan doa dan dukungannya.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang namanya mungkin tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga segala kebaikan tersebut dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga penulis sangat menghargai setiap kritik dan saran yang diberikan. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
MOTTO v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv
ABSTRAK xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 11
1.3 Tujuan Penelitian 12
1.4 Manfaat Penelitian 13
1.5 Sistematika Penulisan 14
BAB II KAJIAN PUSTAKA 17
2.1 Landasan Teori 17
2.1.1 Teori Atribusi 17
2.1.2 Pajak Daerah 18
2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 19
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 20
2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak 21
2.1.6 Tingkat Penghasilan 22
2.1.7 Kualitas Pelayanan 23
2.1.8 Kepercayaan Publik 24
2.1.9 Perkembangan Infrastruktur 26
2.1.10 Tingkat Pendidikan 27
2.2 Penelitian Terdahulu 28

2.3 Hipotesis 34
2.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 34
2.3.2 Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 35
2.3.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 37
2.3.4 Pengaruh Kepercayaan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 38
2.3.5 Pengaruh Perkembangan Infrastruktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 39
2.4 Rerangka Konseptual 40
BAB III METODE PENELITIAN 41
3.1 Populasi dan Sampel 41
3.2 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data 42
3.3 Definisi Variabel Penelitian 44
3.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak 44
3.3.2 Kesadaran Wajib Pajak 45
3.3.3 Tingkat Penghasilan 46
3.3.4 Kualitas Pelayanan 47
3.3.5 Kepercayaan Publik 49
3.3.6 Perkembangan Infrastruktur 50
3.4 Analisis Statistik Variabel Penelitian 51
3.4.1 Uji Validitas 52
3.4.2 Uji Reliabilitas 52
3.5 Uji Asumsi Klasik 53
3.5.1 Uji Normalitas 53
3.5.2 Uji Heteroskedastisitas 54
3.5.3 Uji Multikolinearitas 54
3.6 Analisis Regresi Linear Berganda 54
3.7 Pengujian Hipotesis 56
3.7.1 Uji Statistik T 56

3.7.2 Analisis Koefisien Determinasi 56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 58
4.1 Hasil Pengumpulan Data 58
4.2 Ragam Karakteristik Responden 58
4.2.1 Jenis Kelamin 59
4.2.2 Usia 59
4.2.3 Pendidikan 60
4.3 Uji Statistik Deskriptif 60
4.4 Uji Kualitas Data 64
4.4.1 Uji Validitas 64
4.4.2 Uji Reliabilitas 65
4.5 Uji Asumsi Klasik 66
4.5.1 Uji Normalitas 66
4.5.2 Uji Heteroskedastisitas 67
4.5.3 Uji Multikolinearitas 68
4.6 Analisis Regresi Linear Berganda 69
4.7 Uji Statistik T 73
4.8 Uji Koefisien Determinasi 75
4.9 Pembahasan 76
4.9.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 76
4.9.2 Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 77
4.9.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .. 78
4.9.4 Pengaruh Kepercayaan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 79
4.9.5 Pengaruh Perkembangan Infrastruktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 80
BAB V PENUTUP 82
5.1 Kesimpulan 82
5.2 Keterbatasan Penelitian 83
5.3 Saran 83
5.4 Implikasi 84

DAFTAR PUSTAKA 85
LAMPIRAN 91

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 28
Tabel 3. 1 Tabel Skala Likert 43
Tabel 3. 2 Aspek Pernyataan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak 45
Tabel 3. 3 Aspek Pernyataan Variabel Kesadaran Wajib Pajak 46
Tabel 3. 4 Aspek Pernyataan Variabel Tingkat Penghasilan 47
Tabel 3. 5 Aspek Pernyataan Variabel Kualitas Pelayanan 48
Tabel 3. 6 Aspek Pernyataan Variabel Kepercayaan Publik 50
Tabel 3. 7 Aspek Pernyataan Variabel Perkembangan Infrastruktur 51
Tabel 4. 1 Hasil Pengumpulan Data 58
Tabel 4. 2 Jenis Kelamin Responden 59
Tabel 4. 3 Usia Responden 59
Tabel 4. 4 Tingkat Pendidikan Responden 60
Tabel 4. 5 Hasil Uji Statistik Deskriptif 61
Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas 64
Tabel 4. 7 Hasil Uji Reliabilitas 66
Tabel 4. 8 Kolmogorov-Smirnov Test 67
Tabel 4. 9 Hasil Uji Multikolinearitas 69
Tabel 4. 10 Uji Analisis Regresi Linear Berganda 70
Tabel 4. 11 Hasil Uji Statistik T 73
Tabel 4. 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi 75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Diagram Batang Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2020-2022 5

Gambar 2. 1 Rerangka Penelitian..... 40

Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Scatterplots)..... 68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner 91
Lampiran 2 Jawaban Kuesioner 96
Lampiran 3 Hasil Uji Validitas 112
Lampiran 4 Hasil Uji Reliabilitas 116
Lampiran 5 Hasil Uji Normalitas 118
Lampiran 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas 119
Lampiran 7 Hasil Uji Multikolinearitas 120

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan, kualitas pelayanan, kepercayaan publik, serta perkembangan infrastruktur terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan data primer yang diperoleh langsung dari para responden. Sampel dalam penelitian ini melibatkan 122 wajib pajak, yang diambil menggunakan metode *accidental sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari analisis tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kepercayaan publik, dan perkembangan infrastruktur memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta. Sementara itu, tingkat penghasilan dan kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Yogyakarta.

Kata kunci: Kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan, kualitas pelayanan, kepercayaan publik, perkembangan infrastruktur, dan pajak kendaraan bermotor.

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of taxpayer awareness, income rate, service quality, public trust, and infrastructure development on motor vehicle taxpayer compliance in Yogyakarta City. This study is a quantitative study that uses primary data sources obtained directly from respondents. The sample of this study consisted of 100 taxpayers using accidental sampling as a sampling method. The analysis technique of this study uses multiple linear regression analysis. The results of the regression analysis show that taxpayer awareness, public trust, and infrastructure development have a significant positive effect on motor vehicle taxpayer compliance in Yogyakarta City. While income rate and service quality have a negative effect on motor vehicle taxpayer compliance in Yogyakarta City.

Keywords: Taxpayer compliance, taxpayer awareness, income rate, service quality, public trust, infrastructure development, and motor vehicle ta

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bentuk usaha dari pemerintah bangsa Indonesia dalam rangka memajukan pembangunan nasional salah satunya adalah melalui pajak. Ditinjau dari segi perundang-undangan, pajak dapat diartikan sebagai sebuah kontribusi dari warga negara, baik orang pribadi maupun badan yang bersifat wajib dan mengikat kepada negara yang tidak mendapat kompensasi atau imbalan pada saat dibayarkan, lalu pajak ini yang nantinya akan digunakan untuk berbagai kepentingan negara yang tujuan utamanya adalah kemakmuran rakyat. Hal inilah yang menyebabkan peran pajak begitu vital dalam kehidupan suatu negara, terlebih dalam penguatan pembangunan di Indonesia (Halomoan & Herning Sitabuana, 2022).

Menurut Bhegawati et al. (2022) hampir semua negara menggunakan pajak sebagai sumber pendapatannya, terkecuali beberapa negara yang memamng memiliki taraf kekayaan yang sangat besar akan sumber daya alam tertentu sehingga nantinya sumber daya tersebut dapat digunakan sebagai sumber penerimaan utama negaranya. Bagi mayoritas negara, pemanfaatan pajak yang benar dan bijak dapat menjaga dan mempertahankan stabilitas ekonomi di negara tersebut. Pemerintah dengan pertimbangan penuh dapat menurunkan maupun menaikkan pajak, menyesuaikan keadaan yang sedang terjadi. Rendahnya tarif pajak dapat berperan sebagai impuls bagi pertumbuhan ekonomi karena dapat

menarik minat para pelaku dalam perekonomian untuk melakukan transaksi baik dalam skala nasional hingga internasional. Di sisi lain, tarif pajak yang tinggi dapat menjadi penekan inflasi yang mutakhir. Dengan tingginya tarif yang berlaku, masyarakat cenderung akan mengurungkan niatnya untuk bertransaksi dan menjadi lebih tidak konsumtif. Dengan demikian, jumlah uang yang beredar pun mampu dikendalikan sehingga nilai mata uang tidak akan goyah.

Pada dasarnya pajak mempunyai 2 (dua) fungsi primer dalam penerapannya, yakni fungsi *budgetair* dan *regularend.* Fungsi *budgetair* memiliki makna bahwa pajak adalah basis penerimaan pemerintah guna menyokong seluruh aktivitas dan kebutuhan negara, sedangkan fungsi *regularend* dapat diartikan juga sebagai fungsi pengatur, layaknya sebuah alat yang diperuntukkan dalam melaksanakan dan mengatur kebijakan pemerintah demi mencapai tujuan maupun target tertentu (Zaikin et al., 2022). Selain itu, pajak juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan lainnya, seperti menciptakan pemerataan kekayaan yang terdapat pada berbagai lapisan masyarakat. Hal ini didukung oleh pengaplikasiannya PPh pasal 21 yang mengandung tarif progresif yang berarti semakin tinggi tingkat penghasilan seorang wajib pajak, maka tarif pajak yang akan dikenakan juga akan semakin besar. Namun, jika penghasilan wajib pajak tersebut berada di bawah batas minimum yang dikenai pajak, maka ia dapat terbebas dari kewajiban untuk membayar sebagian dari penghasilannya kepada negara.

Pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan berdasarkan lembaga pemungutnya, yakni pajak nasional dan daerah. Sebagian besar pajak nasional diatur dan dikendalikan langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak atau yang biasa dikenal sebagai DJP. Hal ini disebabkan karena pajak tersebut dipungut oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat melimpahkan kuasanya untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tentunya hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal, seperti efisiensi administrasi hingga koordinasi dan konsistensi kebijakan pajak yang lebih mutakhir. Macam-macam pajak yang berada dibawah pengelolaan pemerintah pusat meliputi pajak penjualan dari barang mewah (PPnBM), pajak penghasilan (PPh), maupun pajak pertambahan nilai (PPN). Pendapatan dari pajak-pajak ini sepenuhnya dialokasikan untuk mendukung kebutuhan negara, seperti pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berbeda dengan pajak pusat, pemerintah daerah dalam cakupan provinsi maupun kabupaten/kota masing-masing sepenuhnya memiliki otoritas dalam memungut dan mengelola pajak yang dipungut di daerahnya sendiri. Penerimaan pajak tersebut akan dimanfaatkan sepenuhnya dalam menyokong aktivitas dan pengeluaran daerah. Menurut Sakura & Rachman (2021), salah satu pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor atau PKB menjadi sumber perolehan tertinggi yang dapat daerah kumpulkan dari wilayahnya sendiri.

Pajak kendaraan bermotor atau yang lebih akrab disebut sebagai PKB merupakan jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan terbesar yang dapat diterima oleh provinsi. Pajak ini merupakan pajak yang fleksibel karena walaupun sebenarnya pajak kendaraan bermotor ini diatur oleh pemerintah provinsi, tetapi

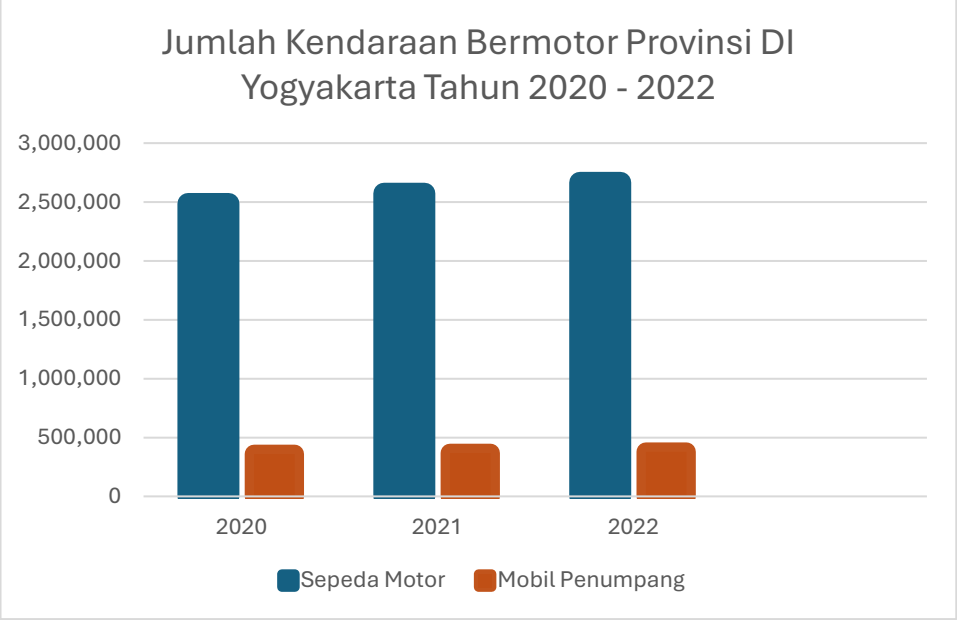
setiap pemerintah kabupaten/kota di dalamnya pun berhak melakukan pemungutan dengan tujuan memudahkan masyarakat dalam membayarkan pajak ini (Kusumawati & Rachman, 2021). Mengingat bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk salah satu sumber perolehan asli bagi daerah, sudah seyogianya jika daerah yang memiliki kepadatan penduduk beserta dengan kendaraan pribadinya yang tinggi akan mendapatkan pemasukan dana yang lebih tinggi pula.

Seiring dengan berkembangnya zaman yang memicu perkembangan teknologi dan ekonomi, serta populasi manusia yang terus melonjak naik, keadaan jalanan di Indonesia pun kian memadat. Jumlah kendaraan bermotor yang tinggi ini tidak lain digunakan sebagai sarana mobilitas utama dalam aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dapat dijadikan pula sebagai objek pajak oleh pemerintah daerah guna menunjang perkembangan sarana dan prasarana daerah yang perlu mengimbangi lajunya peningkatan jumlah kendaraan bermotor ini (Prasetyo, 2020).

Sama halnya dengan fenomena di salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana keadaan jalanannya kian memadat. Jumlah peredaran kendaraan bermotor di Yogyakarta telah mengalami peningkatan secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Lonjakan ini didukung oleh beberapa faktor utama, seperti pertumbuhan ekonomi yang membaik dari waktu ke waktu sehingga memungkinkan masyarakat untuk memiliki daya beli yang cukup untuk memiliki minimal satu kendaraan bermotor

pribadi. Faktor lainnya adalah Yogyakarta tak bisa dipungkiri layaknya sebuah magnet yang kian menarik berbagai pendatang pada beberapa daerah di Indonesia. Pendatang ini berasal dari berbagai kalangan, seperti wisatawan, pekerja, dan yang paling dominan adalah pelajar. Daerah yang dikenal sebagai Kota Pelajar ini menarik ribuan pelajar dan mahasiswa setiap tahunnya yang menjadikan kota ini semakin memadat. Bahkan, para pelajar yang telah menyelesaikan studinya pun tidak sedikit pula yang memilih untuk menetap di Yogyakarta untuk bekerja dan melanjutkan hidup. Menurut Sisi & Wage (2023), pertumbuhan dan kepadatan masyarakat yang pesat akan secara signifikan mempengaruhi minat masyarakat dalam memiliki kendaraan pribadi karena pada era modern ini, kendaraan bermotor bukanlah suatu barang yang mewah lagi, melainkan telah menjadi kebutuhan untuk kepentingan mata pencaharian maupun mobilitas pelajar untuk mencari ilmu.

Gambar 1. 1 Diagram Batang Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2020-2022



Sumber: Data Badan Pusat Statistik Indonesia

Berdasarkan diagram yang disajikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah kendaraan bermotor yang tersebar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami tren yang kian menanjak. Selain menjadi kesempatan bagi Yogyakarta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajaknya, di sisi lain banyaknya kendaraan bermotor ini melahirkan tantangan bagi pemerintah daerah. Tentunya dampak yang ditimbulkan dari padatnya kendaraan adalah meningkatnya kemacetan lalu lintas, pencemaran udara, banyaknya angka kecelakaan, hingga permintaan dan kebutuhan akan sarana dan prasarana yang terus meningkat. Melalui pajak kendaraan bermotor (PKB) ini, dana yang terhimpun dapat dialokasikan sebesar-besarnya untuk kemakmuran daerah dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dari fenomena lonjakan kendaraan bermotor yang terus terjadi setiap tahunnya. Salah satu syarat hal tersebut dapat terjadi adalah kepatuhan yang timbul dari setiap diri wajib pajak. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, pendidikan yang menjurus pada kepatuhan pajak memiliki peran vital dalam membentuk pemahaman individu mengenai sistem keuangan, tata kelola, dan tanggung jawab sipil (Fatmasari et al., 2023).

Menurut Budiarti & Fadhilah (2022) pada penelitian Hamidi & Rivandi (2023), apabila wajib pajak memiliki kepatuhan perpajakan yang besar, sanksi yang besar pada wanprestasi, serta program pemotongan pajak pemerintah berlangsung dengan baik dan berjalan mulus sesuai dengan rencana, maka

penerimaan pajak diperkirakan akan meningkat. Untuk mengamati kepatuhan wajib pajak lebih lanjut, telah disajikan macam-macam aspek yang dapat berpengaruh pada kepatuhan pembayar pajak, seperti kesadaran wajib pajak, kepercayaan publik, perkembangan infrastruktur, tingkat penghasilan, maupun mutu pelayanan fiskus.

Kesadaran wajib pajak merupakan sorotan pertama untuk penelitian ini karena sadar merupakan sebuah dasar dari setiap perilaku suatu individu. Kesadaran melibatkan sepenuhnya beberapa aspek dalam nurani manusia, seperti kemampuan untuk merasakan, berpikir, dan mengolah informasi sehingga akan terbentuknya sebuah keputusan yang sepenuhnya berasal dari olah pikiran suatu individu. Dalam perpajakan, menurut Zaikin et al. (2022) kesadaran merupakan bentuk realisasi dari pemahaman seseorang tentang pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan atau membayar pajak, juga sebuah peran yang dapat dilakukan masyarakat untuk negaranya, sehingga membayar kewajiban perpajakan bukanlah menjadi sebuah beban lagi.

Penghasilan adalah aspek utama yang menentukan kondisi perekonomian seseorang. Selain itu menurut Kusumawati & Rachman (2021), salah satu determinan paling relevan dalam menilai kepatuhan wajib pajak adalah tingkat penghasilan mereka. Individu yang memiliki penghasilan menengah ke atas akan memiliki kemudahan dalam menyisihkan sebagian kecil dari harta mereka untuk dibayarkan menjadi pajak. Berbeda dengan individu berpenghasilan kecil, mereka tentunya akan lebih mementingkan kebutuhan pokok sehari-hari daripada

membayar pajak. Bahkan, penghasilan yang mereka peroleh dapat saja habis tak bersisa sehingga tidak memungkinkan untuk disisihkan sebagian guna membayar kewajiban perpajakannya. Hal ini selaras dengan temuan Safina Fatmawati (2022), ia mengemukakan bahwa tingkat penghasilan seseorang memengaruhi kepatuhan dalam menjalankan aturan hukum dan kewajiban pajak. Dengan demikian semakin tinggi tingkat pendapatan seorang wajib pajak, semakin tinggi pula kepatuhannya dalam memenuhi kewajibannya ini.

Aspek yang mempengaruhi kepatuhan bukan hanya berasal dari nurani setiap individu saja, melainkan juga terdapat faktor-faktor dari luar diri yang berkesinambungan dalam mempengaruhi persepsi wajib pajak. Seseorang yang awam dengan perpajakan membutuhkan bimbingan yang efektif agar dapat menyelesaikan kewajibannya dan memiliki bekal pengetahuan yang nanti akan digunakan kembali pada tahun-tahun berikutnya. Bimbingan ini tidak lain berasal dari fiskus atau otoritas perpajakan yang mana dapat diukur berdasarkan beberapa aspek, seperti ketersediaan dan kejelasan informasi, kecepatan layanan, kemudahan akses, sikap yang profesional, hingga pengelolaan umpan balik. Menurut Sugiyani et al. (2023), kualitas pelayanan yang disediakan otoritas perpajakan memiliki peranan yang vital karena melalui pemberian layanan yang baik dan sesuai dengan ekspektasi pelanggan yang dalam konteks ini adalah wajib pajak, dapat memupuk kepuasan yang berujung pada tingginya derajat kepatuhan pada wajib pajak. Hal tersebut terbukti mengingat salah satu alasan mengapa rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah pelayanan dari otoritas perpajakan yang dianggap belum mencapai tingkat optimal.

Terkait dengan otoritas perpajakan, kepercayaan masyarakat juga merupakan aspek yang memengaruhi sikap wajib pajak. Aspek ini, yang bersumber dari luar diri seorang wajib pajak, mampu berpengaruh terhadap cara pandang mereka akan kewajiban perpajakan. Kepercayaan publik merujuk pada sejauh mana masyarakat memegang keyakinan dan kepercayaan terhadap individu, organisasi, institusi, maupun sistem yang berlaku yang memiliki kuasa untuk menjalankan pemerintahan. Menurut Liu (2024), pemerintah perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam urusan publik sebagai pemecah masalah ketika menyangkut efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintahan. Kepercayaan publik sangat penting sebab menjadi fondasi bagi interaksi sosial, ekonomi, dan politik yang stabil dan efektif (Rahima, 2021). Ditinjau dari segi perpajakan, derajat kepercayaan tersebut bergantung pada keyakinan jika pendapatan perpajakan akan digunakan demi kemakmuran bersama. Akan tetapi apabila kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah memudar atau masyarakat meyakini bahwa otoritas perpajakan maupun pemerintah melakukan penyalahgunaan terhadap pajak dan tidak bertindak adil terhadap pelanggaran, maka dipercaya tingkat ketidakpatuhan pajak dapat melambung naik (Ananda, 2024).

Perkembangan infrastruktur atau sarana dan prasarana telah menjadi syarat secara tersirat bagi masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat tentu menuntut bukti nyata hasil dari uang yang mereka bayarkan untuk negara. Menurut Banerjee et al. (2020), perkembangan infrastruktur terutama dalam sektor transportasi dapat meningkatkan akses daerah pedesaan ke kota yang akan berdampak pada modal produktif dan tenaga kerja terampil mengalir dari desa ke

kota. Tentunya hal tersebut dapat meningkatkan kualitas perekonomian negara dari waktu ke waktu. Akan tetapi, sejatinya pajak memang bersifat tak memberikan keuntungan langsung bagi pembayarnya. Maka, hal yang wajib pajak dapat harapkan adalah dengan melihat dan merasakan langsung kenikmatan dan kenyamanan dari sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah. Terlebih jika wajib pajak tersebut menetap di daerah yang kian padat penduduk dan kendaraan layaknya Kota Yogyakarta. Daerah yang memiliki kepadatan tinggi sangat rawan mengalami kemacetan yang berkepanjangan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah perlu membangun infrastruktur, seperti memperluas jalan, untuk mengurangi risiko kemacetan. Namun, syarat utama agar pembangunan infrastruktur ini bisa terlaksana adalah kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara tertib dan tepat waktu (Sisi & Wage, 2023). Maka dari itu, timbal balik secara tepat antara pemerintah dengan masyarakat sangatlah berperan dalam memajukan daerah dan negara.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya oleh Kusumawati & Rachman (2021) dan Lestari & Ngurah Agung Kresnandra (2023), penelitian tersebut berfokus pada kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan, dan kualitas pelayanan. Pembaharuan untuk studi ini merupakan dengan mengimbuhkan 2 (dua) variabel bebas baru yaitu kepercayaan publik dan perkembangan infrastruktur, serta 1 (satu) variabel kontrol yaitu tingkat pendidikan. Variabel tersebut ditambahkan sebagai variabel kontrol karena tingkat pendidikan memiliki peranan dalam membangun pemahaman wajib pajak yang bersangkutan dengan berbagai hal terkait informasi perpajakan. Selain itu, tingginya tingkat pendidikan

suatu individu disinyalir akan berbanding lurus dengan maju dan berkembangnya pola pikir serta cara tingkah lakunya. Dengan begitu, seseorang yang berpendidikan lebih tinggi akan mampu dan mudah memahami suatu konsep dibandingkan seseorang dengan pendidikan kurang tinggi (Salsabila et al., 2022).

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta dipilih lantaran jumlah kendaraan bermotor di kota ini terus meningkat setiap tahun, sebagaimana dibuktikan pada data dari Badan Pusat Statistik (bps.go.id) mengenai pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta sepanjang tahun 2020 hingga 2022. Dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang terbilang cepat dan pesat di kota ini, Yogyakarta merupakan pilihan yang sangat tepat dan relevan sebagai objek penelitian.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti terdorong untuk menjalankan penelitian dengan responden wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta, menggunakan variabel-variabel yang relevan dengan judul penelitian **"Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Kualitas Pelayanan, Kepercayaan Publik, dan Perkembangan Infrastruktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, didapatkan rumusan masalah penelitian seperti di bawah ini:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah tingkat penghasilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kualitas pelayanan pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah kepercayaan wajib pajak terhadap instansi yang terkait berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah perkembangan dan pembangunan infrastruktur berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, didapatkan tujuan penelitian seperti di bawah ini:

1. Mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Mengetahui apakah tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Mengetahui apakah kualitas pelayanan pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Mengetahui apakah kepercayaan wajib pajak terhadap instansi yang terkait berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Mengetahui apakah perkembangan dan pembangunan infrastruktur berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini ditulis dan disusun dengan harapan akan berguna untuk:

1. Penulis

   Penelitian ini ditulis guna meningkatkan serta memperkaya pemahaman penulis terutama di bidang perpajakan serta penulis mendapatkan pengetahuan langsung dari bidang-bidang yang sedang diteliti, khususnya pengaruh kesadaran membayar pajak, tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, kualitas pelayanan, kepercayaan publik, dan perkembangan infrastruktur atas kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya. Penelitian ini juga dijalankan dalam rangka memenuhi ketentuan kelulusan dan meraih gelar Sarjana pada Universitas Islam Indonesia program studi Akuntansi.

2. Akademik

   Penelitian ini ditujukan mampu sebagai referensi maupun bahan literatur untuk Mahasiswa/Mahasiswi ataupun pihak lainnya yang akan melakukan penelitian maupun menyusun tugas akhir, penelitian ini juga diharapkan mampu mengumpulkan informasi dan wawasan terkait kepatuhan wajib pajak serta determinan yang memengaruhinya.

3. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Penelitian ini disusun dengan fokus utama adalah pajak kendaraan bermotor (PKB) yang merupakan pajak daerah. Pajak ini kemudian akan bermuara dan membentuk penerimaan asli daerah (PAD) bersamaan dengan penerimaan-penerimaan lainnya. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan referensi maupun masukan bagi pemerintah guna mengetahui determinan mana saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga dapat terjaganya penerimaan asli daerah Yogyakata.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis mengklasifikasikan segmentasi untuk tulisan ini ke dalam 5 (lima) bab dan pada setiap bab memiliki hubungan yang sistematis sehingga mempermudah setiap individu yang berkenan untuk membaca untuk memahami isi penelitian ini. Berikut merupakan segmentasi yang dimaksud:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini akan menyajikan pengantar awal penelitian, menjelaskan latar belakang permasalahan, rumusan masalah yang muncul, serta paparan tujuan, nilai, dan manfaat penelitian. Selain itu, akan diuraikan juga struktur penyajian penulisan penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini akan berisikan kajian yang mendalam mengenai dasar teori yang relevan serta menguraikan sejumlah hipotesis yang kemudian diuji kebenarannya pada penelitian ini.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan paparkan secara rinci tentang tahapan penelitian bersama dengan unsur-unsur yang membentuknya, seperti populasi dan sampel yang akan diteliti, jenis data, metode yang dimanfaatkan untuk menghimpun data, berbagai variabel penelitian, serta teknik untuk menganalisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan inti dari penelitian, yang mencakup hasil pengolahan data yang dikumpulkan selama proses penelitian. Hasil ini akan dibahas dan dianalisis menggunakan alat analisis yang sebelumnya telah dirancang.

BAB V : PENUTUP

Pada bab yang merupakan segmen terakhir penelitian ini akan dipaparkan rangkuman menyeluruh mengenai hasil yang telah selesai dilaksanakan dalam penelitian, serta saran yang berperan

sebagai bahan evaluasi serta saran guna penelitian-penelitian serupa di waktu mendatang, juga implikasi penelitian tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Atribusi ialah salah satu konsep dalam dunia psikologi yang ditujukan khusus untuk menelaah perilaku suatu individu dan cara mereka merepresentasikan aksi dan reaksinya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), atribusi memiliki makna pemahaman atas perilaku diri sendiri atau orang lain berdasarkan pada persepsi. Teori atribusi juga mencakup hubungan suatu individu bersama individu lainya yang berada di sekitar mereka. Menurut Prastyatini & Gala (2023), atribusi dapat diartikan sebagai sebuah proses yang dilakukan untuk menemukan jawaban dari pertanyaan apa penyebab dan mengapa seseorang berperilaku demikian.

Teori atribusi ini pun mencoba mencuraikan bahwa landasan seseorang dalam bertindak adalah dengan 2 (dua) faktor, yaitu ekternal maupun internal. Seperti sebutannya, faktor eksternal berarti pengaruh dari luar kendali individu yang bermuara di lingkungan sekitar individu tersebut, ini adalah hal yang tidak terkait langsung dengan karakteristik individu, tetapi sesungguhnya menyumbangkan peranan yang esensial dalam pembentukan interaksi dan tindakan suatu individu. Sebaliknya, faktor internal berada sepenuhnya dalam kuasa dan kendali individu tersebut. Dorongan psikologis yang lebih dominan seperti prinsip, motivasi, dan kepribadian yang akan mengilhami perilaku, keputusan, dan tingkah laku seseorang. Teori ini telah banyak menjadi suatu

landasan bagi beberapa konteks penelitian, seperti pendidikan, hubungan interaksi sosial, manajemen, psikologi klinis, bahkan ekonomi bisnis (Maretanidanini et al., 2023).

Macam-macam faktor inilah yang akan menjembatani para wajib pajak di Indonesia ketika melaksanakan kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak adalah sebuah nilai yang timbul berkat hadirnya dorongan psikologis seorang wajib pajak. Seperti yang telah diungkit sebelumnya, faktor-faktor penentu tindakan manusia baik internal maupun eksternal bekerja secara berkesinambungan dan saling merajut membentuk kesadaran akan pentingnya membayar pajak bagi keberlangsungan negara. Jika dikaitkan dengan kepatuhan pajak, teori atribusi akan berhubungan dengan karakter wajib pajak agar mampu menaati peraturan perpajakan yang dipengaruhi oleh dorongan dari dalam diri individu (internal) maupun lingkungan sekitar (eksternal) (Riyanti & Sudarmawanti, 2022).

2.1.2 Pajak Daerah

Indonesia menjadi negara yang memiliki keragaman secara sangat bermacam-macam, tidak bisa dipungkiri mengingat betapa luasnya bentang alam negeri ini, maka keragaman tersebut telah menjadi ciri khas dari kebudayaan Indonesia. Indonesia pun terbagi menjadi 38 (tiga puluh delapan) provinsi yang kemudian terbagi lagi menjadi 514 kabupaten/kota di tahun 2024 ini. Di sisi lain, selaras dengan banyak dan luasnya wilayah di Indonesia, pembangunan dan perekonomian dapat tergolong belum merata. Maka, guna menciptakan pembangunan yang merata, pemerintah pusat mengesahkan otonomi daerah (Setyawan, 2022).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengenai pemerintahan daerah dan otonomi daerah, otonomi adalah sebuah wewenang, hak, serta tanggung jawab bagi daerah otonom untuk mengelola kepentingan pemerintah hingga kebutuhan rakyat sendiri sesuai pada regulasi yang telah ditulis dalam perundang-undangan. Tentunya pemberlakuan otonomi daerah ini menghadirkan angin segar bagi pemerintah daerah karena mendapat kewenangan yang lebih leluasa dan nyata. Masing-masing daerah wajib memiliki penghasilan yang memadai agar dapat menjalankan proses penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 mengatakan jika salah satu alternatif dalam menghimpun pendapatan daerah adalah melalui pajak daerah (Rosa et al., 2020).

Rikayana & Nurhasanah (2020) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa pajak daerah menjadi sumber pendapatan yang diterima dari pemerintah daerah, baik di Tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan dan operasional pemerintahan daerah berdasar pada yang ditentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Iuran ini diberlakukan bagi perorangan pribadi maupun badan pemerintahan dengan tak memperoleh imbalan secara langsung, lalu diperuntukkan guna membiayai kebutuhan daerah serta kemakmuran rakyat daerah.

2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor maupun yang lebih sering disebut PKB merupakan bentuk pajak yang dibebankan untuk pemilik kendaraan bermotor, misalnya sepeda motor, truk, mobil, maupun kendaraan sejenis. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, kendaraan bermotor diartikan sebagai semua kendaraan beroda, termasuk gandengan, yang beroperasi di jalan darat atau air. Kendaraan tersebut digerakkan oleh motor maupun perangkat lainya yang mampu mengonversi energi ke dalam tenaga penggerak.

Pajak kendaraan bermotor (PKB) dikelola oleh pemerintah provinsi, tetapi setiap kabupaten/kota di dalamnya berhak menarik iuran ini dalam rangka memudahkan para wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya (Kusumawati & Rachman, 2021). Setiap kendaraan yang dimiliki oleh warga kabupaten/kota akan begitu berarti untuk menunjang kemajuan daerah, bukan hanya berdampak pada peningkatan infrastruktur dan transportasi saja, melainkan juga bermanfaat bagi kemajuan ekonomi lokal karena seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD), maka perekonomian lokal pun juga merangkak naik melalui berbagai program yang ditujukan untuk usaha kecil, pariwisata, dan industri lokal.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Mengacu penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan berdasar pada istilah “patuh” yang bermakna suka menuruti perintah dan aturan. Sudah seyogianya bagi individu mengikuti peraturan yang berlaku di lokasi tempat ia berada. Sama halnya dengan peraturan perpajakan yang bersifat wajib, memaksa, dan mengikat. Pada konteks perpajakan, wajib pajak berhak sekaligus berkewajiban membayarkan sebagian hartanya tanpa harus dilaksanakan pemeriksaan, investasi menyeluruh, maupun ancaman sanksi administratif maupun hukum, sesuai dengan ketentuan perpajakan. (Oliviandy, Astuti, Siddiq, 2021).

Menurut Bani-Khalid et al. (2022), perilaku kepatuhan wajib pajak sangat berhubungan terhadap faktor-faktor sosial maupun mental yang akan berpengaruh terhadap keyakinan dan sikap bawaan mereka, sehingga akan membentuk perilaku mereka terhadap kepatuhan. Maka, kepatuhan wajib pajak ini dapat dipahami secara mendalam dengan menelaah pengaruh sosio-psikologisnya yang dapat berasal dari faktor individu tersebut, sosial, hingga pemerintahannya.

Patuh atau tidaknya wajib pajak merupakan aspek terpenting dalam memanifestasikan target penerimaan sasaran penerimaan pajak, kedua hal ini berhubungan positif. Semakin besar derajat kepatuhan pajak maka penerimaan pajak juga akan berjalan beriringan dengannya (Antika et al., 2021). Maka dari itu, setiap individu maupun badan yang memiliki kendaraan bermotor wajib untuk membayarkan pajaknya setiap tahunnya yang niscaya akan dirasakan manfaatnya di kemudian hari.

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran dapat diartikan sebagau tabiat atau niat positif seorang individu dalam menjalankan tindakannya tanpa harus dipaksa oleh siapa pun maupun oleh hal apa pun. Ditinjau dari segi perpajakan, kesadaran wajib pajak berarti para pembayar pajak suka dan rela serta serius melaksanakan kewajibannya tanpa terdapatnya pengaruh maupun motivasi dari pihak lainya (Kusumawati & Rachman, 2021).

Uzunali et al. (2021) mengemukakan bahwa mayoritas wajib pajak mengembangkan persepsi jika membayar pajak hanya akan membatasi pengeluaran mereka serta mengurangi tabungan dari penghasilan yang telah

dikumpulkan sebelumnya. Lahirnya persepsi negatif didukung oleh kurangnya kesadaran serta sistem perpajakan yang berlaku kurang baik. Maka dari itu, administrasi perpajakan serta sikap dan etika masyarakat perlu dibenahi guna meningkatkan penerimaan pajak.

Sebelum menyentuh taraf sadar, masyarakat yang menjadi wajib pajak seharusnya memiliki pengetahuan serta mengakui sistem perpajakan yang berlaku. Seorang wajib pajak diharapkan akan menerima, mengakui, dan menghormati peraturan perpajakan sesuai dengan dalamnya pemahaman dirinya mengenai perpajakan, sehingga hal tersebut akan memupuk kesadaran dari dalam diri setiap wajib pajak. Menurut Lisa & Hermanto (2021), penyebab utama rendahnya kesadaran wajib pajak ialah kurangnya manfaat yang dinikmati oleh pembayar pajak, sehingga asumsi utamanya adalah bahwa masyarakat pada dasarnya enggan membayar pajak, hal tersebut berlangsung dikarenakan mereka tidak memahami manfaat pajak yang sebenarnya.

Menurut Zaikin et al. (2022), kesadaran wajib pajak memberikan dampak yang signifikan terhadap derajat kepatuhan perpajakan. Bahwasanya selain memupuk loyalitas dan disiplin akan peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak pun dapat meningkatkan sikap kritis bagi wajib pajak jika dihadapkan dengan persoalan perpajakan nantinya seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah serta perubahan-perubahan di masa mendatang.

2.1.6 Tingkat Penghasilan

Penghasilan adalah imbalan yang dapat berupa uang atau benda yang diterima oleh entitas setelah menyelesaikan kegiatan ekonomi seperti transaksi,

investasi, maupun pekerjaan tertentu dalam periode tertentu. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, menurut sudut pandang perpajakan, penghasilan juga dapat dimaknai sebagai kemampuan ekonomis ekstra yang didapatkan oleh wajib pajak, kemudian dapat digunakan dalam rangka memperbanyak kekayaan wajib pajak tersebut. Penghasilan merupakan aspek penting bagi individu guna menjalankan kewajibannya dan sebagai salah satu determinan kepatuhan wajib pajak di Indonesia (Hasnizar et al., 2020).

Masyarakat yang kurang mampu akan lebih merasa keberatan dalam membayarkan pajak karena pertimbangan biaya yang mereka miliki cenderung lebih besar. Tentunya mereka akan mementingkan pengeluaran guna menyambung hidup dan biaya keperluan sehari-hari. Tak jarang penghasilan yang mereka miliki malah justru masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Menurut Prasetyo (2020), kondisi keuangan dan tingkat penghasilan adalah aspek yang begitu sukar untuk diprediksi karena ada kemungkinan wajib pajak sebenarnya memiliki penghasilan yang cukup. Namun, pada waktu tertentu muncul masalah yang mempengaruhi kemauan dan kemampuan mereka untuk membayar pajak, yang akhirnya menurunkan tingkat kepatuhan. Sebaliknya, ketika kondisi keuangan wajib pajak sedang baik, mereka cenderung akan patuh dan membayar pajak secara sukarela.

2.1.7 Kualitas Pelayanan

Pelayanan adalah bentuk tindakan yang disuguhkan untuk mendukung, mengakomodasi, dan memenuhi kebutuhan orang lain yang membutuhkan. Konteks pelayanan di sini adalah pelayanan publik, di mana lembaga

pemerintahan/publik menyediakan layanan yang difokuskan untuk menolong masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraannya. Kualitas mengacu pada derajat keunggulan atau keistimewaan sesuatu yang diukur menurut sejauh mana hal tersebut mencukupi maupun melampaui ketentuan atau juga harapan yang telah ditentukan. Pada kasus perpajakan, tidak semua orang punya informasi atau pengetahuan yang setara, maka dibutuhkan seseorang atau sesuatu untuk membimbing mereka (Bhegawati et al., 2022). Selain itu, menurut Sugiyani, Ningsih, dan Dewi (2023) kepatuhan wajib pajak juga bergerak selaras dengan pemahaman mengenai perundang-undangan pajak yang ada di Indonesia.

Menurut Indaswari, Adnyana, dan Sudiartana (2021), kepatuhan wajib pajak sangat bergantung pada bagaimana fiskus pajak menghadirkan kemudahan dalam layanannya. Hadirnya pelayanan yang baik dari fiskus pajak akan berpengaruh pada motivasi individu untuk bertindak taat. Oleh karena itu, sikap kooperatif petugas pajak dalam menyediakan informasi, panduan, serta kemudahan, tanpa mengecewakan wajib pajak, akan secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak di Indonesia.

2.1.8 Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik adalah sebuah keyakinan yang dimiliki masyarakat terhadap kompetensi dan integritas suatu lembaga maupun organisasi publik/pemerintahan. Kepercayaan publik menunjukkan sejauh mana masyarakat meyakini bahwa entitas tersebut akan berlaku transparan, jujur, amanah, dan sesuai dengan kepentingan umum. Beshi & Kaur (2020) menyebutkan dalam

penelitiannya bahwa kepercayaan terhadap pemerintah mengacu pada tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintahnya untuk ‘melakukan hal yang benar’ dan bertindak secara jujur atas nama masyarakat. Kepercayaan ini berdasar pada kemauan mengandalkan orang lain untuk bertindak atas nama kita berdasarkan keyakinan bahwa mereka yang mewakili memiliki kompetensi dan kapasitas dalam membuat keputusan yang efektif dan tentunya mempertimbangkan kepentingan kita.

Dalam mempertimbangkan kepercayaan terhadap instansi yang terkait, masyarakat membutuhkan nilai lain seperti akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai penuh tanggung jawab, instansi pemerintah perlu mengimbangi keputusan-keputusan yang diambilnya dengan sikap berani menerima dan menjalani konsekuensi yang timbul dari keputusan tersebut. Sudrajat (2021) mengatakan bahwa akuntabilitas adalah serangkaian aktivitas serta temuan di akhir yang wajib menjadi tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat yang bertujuan untuk mendorong fungsi transparansi sebagai sebuah skema yang dapat menghindarkan dari berbagai macam bentuk penyimpangan seperti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di suatu lembaga pemerintahan.

Dalam hal perpajakan, konteks kepercayaan didefinisikan menjadi kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas dan pemerintah menjadi pengelola administrasi perpajakan. Tentunya pembayar pajak berharap pihak berwenang dapat mengatur mekanisme dalam pajak dengan tepat guna serta memanfaatkan pajak menjadi sumber pendanaan untuk pembangunan nasional. Walaupun dalam praktiknya, tak sedikit para pejabat khususnya yang berasal dari otoritas

perpajakan melakukan penyimpangan yang merugikan negara dan tentunya rakyat yang paling dirugikan. Jika hal seperti ini terus terjadi dan tidak diberantas hingga akar masalahnya, penurunan penerimaan pajak negara sudah bisa dipastikan akan segera terjadi. Maka dari itu, jika pemerintah dapat menumbuhkan kepercayaan dan ketenangan di hati masyarakat niscaya wajib pajak akan lebih patuh pada undang-undang perpajakan dan menghindari tindakan tidak bijaksana lainnya (Supriatno et al., 2023).

2.1.9 Perkembangan Infrastruktur

Infrastruktur dapat diartikan sebagai serangkaian fasilitas fisik dan sistem yang menunjang aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat. Infrastruktur dapat berupa fasilitas energi, telekomunikasi, keamanan, transportasi, dan sejenisnya. Infrastruktur dapat dianggap sebagai fasilitas publik yang paling penting dalam menunjang perekonomian suatu negara, karena kemajuan sarana dan prasarana sangat memengaruhi efisiensi dan efektivitas aktivitas ekonomi (Aldona et al., 2021).

Dalam konteks perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor, para wajib pajak tentunya mengharapkan sebagian harta yang mereka bayarkan akan membantu pembangunan fasilitas dan infrastruktur di daerah tersebut yang dapat berupa fasilitas listrik dan penerangan, fasilitas jalan, maupun fasilitas pelayanan publik lainnya, meskipun memang sifat pajak sebenarnya tidak bisa diperoleh secara langsung imbalannya. Namun, apabila pajak yang dibayarkan dimanfaatkan secara efisien dan sesuai dengan tujuannya, penerimaan pajak akan merambah naik seiring dengan bertambahnya derajat kepatuhan. Ahmad (2022)

mengemukakan bahwa kunci dari perkembangan dan keberhasilan infrastruktur yang berdampak baik pada perkembangan ekonomi terletak pada aspek kelembagaannya.

2.1.10 Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan proses sistematis guna meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, potensi, hingga karakter melalui berbagai macam bentuk pengalaman belajar. Tingkat pendidikan yang menyangkut perpajakan berarti tahap pendidikan dalam konteks formal yang terdapat tujuan dalam mengembangkan kemauan dan kompetensi, serta sikap suatu individu (Salsabila et al., 2022). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, seluruh penduduk Indonesia wajib mengenyam pendidikan sekurang-kurangnya selama 9 (sembilan) tahun. Lalu, kebijakan ini akan ditingkatkan melalui Rancangan Undang-Undang Sisdiknas Pasal 7 ayat 2 menjadi wajib belajar bagi masyarakat Indonesia selama 13 (tiga belas) tahun.

Salsabila, Handayani, dan Heriyanto (2022) mengatakan bahwa melalui pendidikan, individu mampu lebih mudah menerima pengetahuan dan informasi lalu menerapkanya pada kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan formal berperan dalam menciptakan karakter individu sehingga lebih terbuka terhadap beberapa hal terbaru. Oleh karena itu, orang yang terdapat tingkatan pendidikan secara lebih tinggi cenderung lebih mudah memahami hak maupun kewajiban mereka, termasuk dalam hal perpajakan. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan terkait individu dengan berpendidikan tinggi akan senantiasa patuh, mereka dapat pula menggunakan ilmu dan kepintarannya untuk berusaha mencari

celah dalam perpajakan demi menghindari pembayaran pajak. Menurut (Oluba Ojo, 2020), penghindaran pajak atau *tax avoidance* dianggap sebagai cara mengidentifikasi celah dalam undang-undang perpajakan yang berlaku dan kemudian memanfaatkan celah tersebut untuk mengurangi pajak yang terutang. Aktivitas ini tentu menguntungkan pembayar pajak karena uang yang mereka keluarkan akan sangat minimal, tetapi dampak yang ditimbulkan bagi negara sangatlah besar. Negara akan merugi jika penerimaan pajaknya menjadi anjlok jika terdapat banyak wajib pajak yang melakukan tindakan tidak terpuji ini.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Kusumawati & Rachman (2021)	Analisa Pengaruh Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	Independen: 1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Tingkat Penghasilan 3. Sosialisasi Perpajakan 4. Akuntabilitas Pelayanan Publik Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak	Pemahaman pembayar pajak terdapat pengaruh positif terhadap ketaatan pembayar pajak di kantor SAMSAT Kabupaten Karanganyar. Edukasi terkait pajak terdapat pengaruh positif pada ketaatan pembayar pajak di kantor SAMSAT Kabupaten Karanganyar. Akuntabilitas pelayanan publik tidak terdapat

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
				pengaruh pada ketaatan pembayar pajak di kantor SAMSAT Kabupaten Karanganyar. Tingkat penghasilan wajib pajak terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor SAMSAT Kabupaten Karanganyar.
2	Salsabila, H., Handayani, D., & Heriyanto, R. (2022)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Gender, Jenis Pekerjaan, dan Tingkat Pendidikan	Bebas: 1. Gender wajib pajak 2. Jenis pekerjaan 3. Tingkat pendidikan Dependen: 1. Kepatuhan wajib pajak	Perbedaan gender wajib pajak tidak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat penghasilan wajib pajak terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pendidikan wajib pajak terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
3	Sugiyani, F., Ningsih, S., & Dewi, MW.(2023)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Denda Pajak, dan Penerapan Sistem SAKPOLE Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor SAMSAT Kota Surakarta	Independen: 1. Kualitas pelayanan fiskus 2. Denda pajak 3. Penerapan sistem SAKPOLE Dependen: 1. Kepatuhan wajib pajak	Kualitas pelayanan fiskus terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor SAMSAT Kota Surakarta. Denda pajak terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor SAMSAT Kota Surakarta. Penerapan sistem SAKPOLE terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor SAMSAT Kota Surakarta.
4	Widyastuti, RD. & Anggraini M. (2019)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Pontianak Wilayah II	Bebas: 1. Kesadaran wajib pajak 2. Tingkat penghasilan 3. Sanksi perpajakan 4. Sosialisasi perpajakan Dependen: Kepatuhan wajib pajak	Kesadaran wajib pajak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Pontianak Wilayah II.

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
				Sosialisasi perpajakan terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Pontianak Wilayah II. Sanksi perpajakan terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Pontianak Wilayah II. Tingkat penghasilan wajib pajak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Pontianak Wilayah II.

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
5	Bhegawati, DA., Anik Y., & Ni WS. (2022)	Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar	Independen: 1. Pengetahuan perpajakan 2. Tarif pajak 3. Modernisasi sistem administrasi perpajakan 4. Pemeriksaan pajak 5. Kualitas pelayanan fiskus Dependen: Kepatuhan wajib pajak	Pengetahuan perpajakan terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan fiskus terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
6	Supriatno, Dede., Nanda DO., & Tio YD. (2023)	Pengaruh *Tax Morale* (Pemahaman Aturan Pajak, Kepercayaan pada Pemerintah,	Bebas: 1. Pemahaman aturan pajak 2. Kepercayaan terhadap pemerintah	Pemahaman aturan perpajakan terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
		dan Modernisasi Administrasi Perpajakan) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Pontianak	3. Modernisasi sistem administrasi perpajakan Dependen: Kepatuhan wajib pajak	pajak. Kepercayaan terhadap pemerintah terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
7	Wardana, Arief B. (2017)	*The Impact of Basic Infrastructure on Tax Effort: A Case Study of Municipalities/ Regencies in Indonesia*	Bebas: 1. *Tax compliance* 2. *Tax motivation* 3. *Government approaches for addressing tax compliance* 4. *Tax morale* 5. *Citizen trust in state institutions* Dependen: *Tax effort*	Penelitian ini mengemukakan bahwa sebagian besar variabel infrastruktur memiliki pengaruh positif terhadap indikator performa perpajakan termasuk ketaatan pembayar pajak dan penerimaan pajak di Indonesia.

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
8	Lestari, Desak Made., & Anak Agung Ngurah. (2023)	Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT	Independen: 1. Tingkat pendapatan 2. Pemahaman peraturan perpajakan 3. Kualitas pelayanan Dependen: Kepatuhan wajib pajak	Tingkat pendapatan terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman aturan perpajakan terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Secara umum, kesadaran wajib pajak bermakna seorang tersebut memiliki kesadaran penuh bahwa mereka punya kewajiban yang harus mereka selesaikan atau lakukan sebagai salah seorang warga negara. Kesadaran adalah sikap yang mencakup perasaan, pikiran, dan pandangan, serta kecenderungan untuk bereaksi sesuai dengan hal tersebut. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak sepenuhnya sebagai faktor internal yang mempengaruhi individu dalam memenuhi

kewajibannya, tanpa terdapatnya paksaan faktor eksternal maupun individu lainya (Kusumawati & Rachman, 2021).

Teori atribusi menyebutkan perilaku manusia disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Prinsip ini juga relevan jika dikaitkan dengan perpajakan. Kesadaran misalnya, muncul sebagai hasil dari inisiatif individu yang didorong oleh pemikiran dan hati nurani, tanpa adanya tekanan eksternal. Dengan tingginya inisiatif yang mendasari kesadaran wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya, tingkat kepatuhan yang akan muncul dari diri mereka juga akan tinggi. Hipotesis ini diperkuat oleh penelitian Kusumawati & Rachman (2021) yang mengemukakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan pada ketaatan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban yang dimiliki. Menurut penjelasan di atas, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.3.2 Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Seseorang individu yang telah menyelesaikan aktivitas maupun pekerjaan tertentu lumrahnya akan mendapatkan imbalan sesuai dengan usaha yang dilakukannya, bentuk dari imbalan ini dapat berupa barang maupun uang. Menurut Safina Fatmawati (2022) penghasilan atau pendapatan merujuk pada uang yang diterima oleh individu maupun perusahaan dalam bentuk gaji, komisi, upah, dan laba. Pendapatan ini kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup individu tersebut.

Berdasarkan teori atribusi, pendapatan atau penghasilan seseorang merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi tindakan mereka, di luar pikiran atau hati nurani. Oleh karena itu, tingkat penghasilan berfungsi menjadi faktor secara eksternal yang membawa dampak pada ketaatan pembayar pajak. Atas dasar teori ini, pendapatan atau penghasilan seseorang merupakan faktor eksternal yang berperan dalam tindakan mereka, di luar pikiran atau hati nurani. Oleh karena itu, tingkat penghasilan berfungsi menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Sakura & Rachman (2021), tingkat penghasilan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu pembayaran pajak. Individu dengan pendapatan terbatas cenderung lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan harian mereka, sehingga acap kali mengabaikan kewajiban untuk menyisihkan sebagian pendapatan untuk membayar pajak. Namun, tetap masih ada sebagian kecil dari masyarakat patuh, sehingga mereka akan memperhitungkan dengan lebih matang perkara rasio penghasilan mereka dengan pajak yang mereka tanggung. Pada akhirnya, ketika wajib pajak berada dalam kondisi finansial yang baik dan memiliki pendapatan yang tinggi, kepatuhan terhadap perpajakan akan lebih mudah tercapai. Hipotesis ini sesuai dengan penelitian Safina Fatmawati (2022) yang menyatakan bila tingkat penghasilan/pendapatan individu memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka untuk hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.3.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Demi menunjang penerimaan pajak di Indonesia, tentunya pemerintah maupun instansi yang terkait tidak bisa sepenuhnya mengembalikan kepada pribadi wajib pajak masing-masing. Instansi perpajakan harus berupaya sebaik mungkin dalam mengayomi warga untuk membayarkan pajaknya. Maka dari itu, kualitas pelayanan kantor pajak mesti diperhatikan untuk meningkatkan kepuasan dan kenyamanan masyarakat. Pelayanan yang baik ini akan menimbulkan efek berantai yang membangun persepsi bahwa sebenarnya membayar pajak tidaklah sukar maupun rumit karena dapat dibimbing dan dibantu oleh petugas perpajakannya secara langsung. Dengan ini, wajib pajak akan merasa nyaman dan senang untuk kembali membayarkan kewajibannya di masa-masa mendatang (Sugiyani et al., 2023).

Kualitas pelayanan memainkan peranan penting dalam mempengaruhi perilaku masyarakat dalam membayar pajak. Pelayanan sebagai faktor eksternal akan membentuk persepsi seseorang, yang bisa berkembang ke arah positif atau negatif. Pengaruh eksternal yang positif inilah yang akan menjadi jembatan untuk kemauan-kemauan seseorang ke depannya untuk melakukan hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, dengan baiknya pelayanan yang disuguhkan oleh fiskus atau otoritas perpajakan, maka persepsi baik akan tumbuh dalam diri masyarakat sehingga akan meningkatkan derajat kepatuhan akan perpajakan. Hipotesis ini beriringan dengan penelitian Bhegawati et al. (2022), yang

membuktikan terkait kualitas pelayanan fiskus memiliki hubungan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka, hipotesis dapat dirumuskan sebagai:

H3: Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.3.4 Pengaruh Kepercayaan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sebagai wajib pajak yang telah merelakan sebagian hartanya untuk dibayarkan kepada negara, tentunya wajib pajak menuntut bahwa harta mereka digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran bersama dan dapat mereka rasakan di kemudian hari. Setiap masyarakat mengharapkan pemerintah maupun instansi yang terkait sanggup mengelola tahapan perpajakan dengan efektif juga efisien dengan memanfaatkan dana masyarakat (pajak) menjadi sumber pendanaan pembangunan nasional (Supriatno et al., 2023).

Berdasarkan teori atribusi, kepercayaan publik menjadi pendorong perilaku wajib pajak dari luar atau berlaku sebagai faktor eksternal. Kinerja pemerintah yang kredibel dan akuntabel sangat diharapkan warga Indonesia karena kian hari semakin bertambahnya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang bahkan berlangsung di instansi yang berkaitan langsung dengan perpajakan. Dengan meningkatnya rasa percaya masyarakat akan diimbangi dengan penerimaan pajak yang meningkat pula melalui penerimaan pajak yang baik yang diantarkan oleh kepatuhan para masyarakat. Hipotesis ini berjalan beriringan dengan penelitian Supriatno et al. (2023) yang menjelaskan dalam penelitiannya, adanya pengaruh secara positif antara kepercayaan publik dan

kepatuhan wajib pajak. Berangkat dari uraian tersebut, sehingga hipotesis dapat berupa:

H4: Kepercayaan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.3.5 Pengaruh Perkembangan Infrastruktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kemajuan sarana maupun prasarana menjadi hal yang sudah seharusnya terjadi dan terus berkembang di Indonesia. Normalnya, penerimaan pajak akan digunakan sebesar-besarnya untuk pembangunan negara, termasuk juga dalam usaha pengembangan infrastruktur negara. Wajib pajak sudah semestinya mengharapkan sebagian uang yang mereka keluarkan dapat mengantarkan mereka untuk merasakan infrastruktur yang memadai, seperti infrastruktur jalan, infrastruktur penerangan, infrastruktur pelayanan publik, dan lain sebagainya. Terlebih, tindakan membayar pajak ini berbeda dengan transaksi ekonomi pada umumnya karena warga negara sebagai wajib pajak tidaklah mendapat keuntungan secara langsung dari pembayaran pajak (Wardana, 2017).

Aspek perkembangan infrastruktur merupakan determinan dari luar yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut teori atribusi, faktor eksternal seperti ini dapat berdampak signifikan terhadap perilaku individu, terutama terkait kepuasan dan kenyamanan. Jika sarana dan prasarana yang dirasakan oleh masyarakat berkualitas baik dan memenuhi ekspektasi mereka, hal ini dapat berfungsi sebagai motivasi eksternal bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban mereka, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan

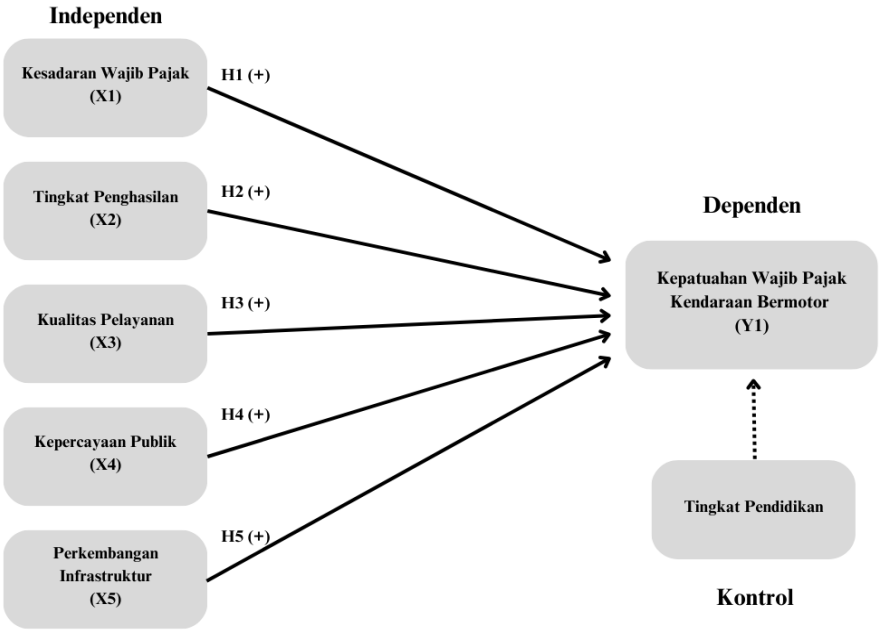
mereka. Hipotesis ini berjalan linear terhadap penelitian Wardana (2017) yang mengemukakan terkait perkembangan infrastruktur berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan efisiensi pemungutan pajak. Dengan demikian, hipotesis dirumuskan:

H5: Perkembangan infrastruktur berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.4 Rerangka Konseptual

Menurut teori dasar serta berbagai penelitian sebelumnya, peneliti akan mengevaluasi dampak untuk setiap variabel bebas terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut merupakan rumusan rerangka pemikiran penelitian:

Gambar 2. 1 Rerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi berdasarkan Sugiyono (2011) dalam Wibawa et al. (2021) merupakan area generalisasi yang meliputi objek dan subjek dalam kualitas maupun karakteristik tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dianalisis serta diambil kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi yang diteliti ialah seseorang yang termasuk ke dalam kategori wajib pajak kendaraan bermotor dan masih aktif membayar pajaknya di Kota Yogyakarta.

Berbeda dengan populasi, sampel merupakan bagian kecil yang mewakili populasi dan diambil melalui metode tertentu. Untuk penelitian ini, sampel yang dimanfaatkan terdiri atas wajib pajak yang sedang atau pernah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kota Yogyakarta. Selain itu, sampel terdiri atas pria dan wanita yang berada dalam rentang usia produktif. Menurut World Health Organization (WHO), usia produktif berada antara 15 hingga 59 tahun, sementara Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menetapkan usia produktif dalam kisaran 15 hingga 64 tahun (Goma et al., 2021). Penelitian ini akan menetapkan kriteria sampel pada usia 20 (dua puluh) hingga 59 (lima puluh sembilan) tahun karena pada usia tersebut seseorang telah memenuhi persyaratan membayar pajak, memenuhi persyaratan mengemudi dan memiliki kendaraan bermotor, memiliki penghasilan, serta belum pensiun. Selain itu, kematangan usia juga akan mempengaruhi kognitif dan pemikiran yang lebih matang dalam merumuskan sebuah keputusan (Amat, 2021).

Teknik *accidental sampling* akan dimanfaatkan dalam penelitian ini, berdasarkan Sugiyono (2012) dalam Anggraeni (2021), *accidental sampling* adalah metode yang bergantung pada kebetulan, di mana siapapun yang secara kebetulan bertemu bersama peneliti mampu terpilih dan dapat dijadikan sampel, asalkan individu tersebut memenuhi kriteria yang relevan untuk dijadikan data. Rumus *lemeshow* dimanfaatkan dalam menentukan total sampel yang akan diteliti. Adapun rumusnya seperti di bawah ini:

$$\boldsymbol{n = \frac{Z^2 \, x \, P \, (1 - p)}{d^2}}$$

Dalam hal ini:

n : Jumlah minimal sampel

Z : Skor Z pada kepercayaan 95% = 1,96

p : Maksimal estimasi (0,5)

d : tingkat kesalahan (10%)

Menurut hasil perhitungan menggunakan rumus yang telah diterapkan, nilai yang diperoleh adalah 96. Kemudian angka tersebut dibulatkan menjadi 100 sampel untuk dijadikan sebagai jumlah responden yang akan dikurasi jawabannya untuk penelitian lebih lanjut.

3.2 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Data primer akan dimanfaatkan untuk penelitian ini dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya, yaitu melalui kuesioner yang akan dibagikan menggunakan *Google Forms* kepada berbagai responden. Berdasarkan penjelasan Sugiyono (2016) dalam Kusumawati & Rachman (2021), kuesioner

maupun angket adalah instrumen pengumpulan data dengan cara memberikan sekumpulan pertanyaan maupun pernyataan persetujuan dari responden, yang kemudian hasil jawaban dari responden tersebut dikumpulkan untuk dianalisis.

Penelitian ini akan memanfaatkan metode *non-probability sampling* atau sampel non probabilitas. Metode sampel non probabilitas tidak memberi peluang secara serupa kepada setiap anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel. Fokus dari metode ini adalah pada sampel kecil yang digunakan untuk mengevaluasi kejadian dalam konteks kehidupan nyata, bukan untuk membuat kesimpulan statistik mengenai populasi yang lebih besar (Firmansyah & Dede, 2022). Selanjutnya, teknik yang akan digunakan adalah *accidental sampling*, teknik ini akan didasarkan pada kebetulan. Siapa pun yang dengan kebetulan bertemu dengan peneliti serta memenuhi kriteria yang relevan mampu dipilih menjadi sampel.

Alat pengumpulan data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini ialah kuesioner yang akan memuat beberapa pernyataan sesuai segmentasi masing-masing variabel. Selanjutnya, jawaban yang mencerminkan persepsi dan pendapat responden akan diukur dengan memanfaatkan skala *Likert* yang tersusun atas 5 (lima) poin penilaian, dengan rincian:

Tabel 3. 1 Tabel Skala Likert

Skala	Pilihan Jawaban
1	Sangat Tidak Setuju (STS)
2	Tidak Setuju (TS)
3	Netral (N)
4	Setuju (S)
5	Sangat Setuju (SS)

3.3 Definisi Variabel Penelitian

Penelitian ini mencakup 7 (tujuh) variabel yang tersusun atas 1 (satu) variabel dependen atau terikat, dan 5 (lima) variabel bebas atau bebas, serta 1 (satu) variabel kontrol. Variabel dependen dalam penelitian ini ialah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya, 5 (lima) variabel independen yang diteliti meliputi kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan, kepercayaan publik, kualitas pelayanan, dan perkembangan infrastruktur. Serta 1 (satu) variabel terakhir yang merupakan variabel kontrol adalah tingkat pendidikan.

3.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Lilis Yulianti (2019) menjelaskan dalam penelitiannya, ketaatan pembayar pajak adalah kondisi ketika individu secara sadar mencukupi kewajiban perpajakan juga mematuhi seluruh peraturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jerry Heriantoni (2023) memiliki pendapat bahwa kepatuhan wajib pajak menjadi keadaan di mana individu menyelesaikan kewajibannya secara tepat waktu dan bertanggung jawab. Kepatuhan wajib pajak secara umum dipahami sebagai kondisi di mana wajib pajak mampu menjalankan dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan jumlah secara terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa terdapatnya adanya paksaan, peringatan, maupun ancaman berupa sanksi hukum atau juga administrasi (Lestari & Ngurah Agung Kresnandra, 2023). Maka, wajib pajak yang masih membayarkan kewajibannya dengan berbekal paksaan dari pihak mana pun belum memenuhi derajat kepatuhan yang optimal.

Variabel kepatuhan wajib pajak ini diketahui dalam 5 (lima) skala *likert* yang terbagi ke dalam 5 (lima) buah pernyataan. Pernyataan-pernyataan ini diadopsi dari penelitian Lilis Yulianti (2019) dan Jerry Heriantoni (2023) yang disesuaikan kembali untuk dijadikan kuesioner penelitian ini tanpa mengubah esensinya sama sekali. Aspek pernyataan-pernyataan yang terkait mampu disimpulkan seperti berikut:

Tabel 3. 2 Aspek Pernyataan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Aspek pernyataan	Referensi
1	Pemenuhan kewajiban sebagai warga negara Indonesia	Lilis Yulianti (2019) & Jerry Heriantoni (2023)
2	Ketepatan waktu untuk membayar pajak kendaraan bermotor	
3	Kelengkapan data dan persyaratan yang dibutuhkan untuk membayar pajak kendaraan bermotor	
4	Pemenuhan kewajiban perpajakan tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun	
5	Sikap menghindari sanksi yang timbul dari wanprestasi	

3.3.2 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Setyani (2018) pada Zaikin et al. (2022) kesadaran wajib pajak adalah manifestasi pada pemahaman hati nurani wajib pajak bahwa memenuhi kewajiban perpajakan adalah bentuk partisipasi maupun kontribusi aktif masyarakat dalam pembangunan nasional. Menurut Lilis Yulianti (2019), kesadaran wajib pajak merujuk pada keadaan di mana wajib pajak memiliki pemahaman, wawasan, serta kesadaran mengenai pajak serta kewajiban mereka.

Sejalan dengan itu, Jerry Heriantoni (2023) berpendapat bahwa kesadaran wajib pajak ialah situasi di mana seseorang sadar penuh tentang pentingnya pajak tersebut. Angka pelanggaran maupun ketidakpatuhan perpajakan dapat diminimalisasi jika para wajib pajak merasa bertanggung jawab dan sadar sepenuhnya akan peran mereka dalam memajukan bangsa Indonesia ini dimulai dari lingkungan sekitar dan daerahnya masing-masing.

Variabel kesadaran wajib pajak ini diukur dalam 5 (lima) skala *likert* yang terbagi ke dalam 5 (lima) buah pernyataan. Pernyataan-pernyataan ini diadopsi dari penelitian Lilis Yulianti (2019) dan Jerry Heriantoni (2023) yang disesuaikan kembali untuk dijadikan kuesioner penelitian ini tanpa mengubah esensinya sama sekali. Aspek pernyataan-pernyataan yang terkait diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 3. 3 Aspek Pernyataan Variabel Kesadaran Wajib Pajak

No.	Aspek pernyataan	Referensi
1	Pembayaran pajak diatur dalam perundang-undangan	Lilis Yulianti (2019) & Jerry Heriantoni (2023)
2	Wajib pajak turut serta dalam pembangunan daerah dan nasional	
3	Pemenuhan kewajiban perpajakan adalah tanggung jawab bagi wajib pajak	
4	Manfaat dari membayar pajak dapat dirasakan bersama	
5	Sadar dengan dampak buruk dari keterlambatan membayar pajak	

3.3.3 Tingkat Penghasilan

Tingkat penghasilan atau pendapatan seseorang dapat memengaruhi kepatuhan dalam melaksanakan ketentuan hukum dan kewajiban pajaknya.

Semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar pula kemungkinan seseorang dalam mengembangkan kepatuhannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Safina Fatmawati, 2022). Menurut Hernita Nur (2022) dalam penelitiannya, tingkat penghasilan pembayar pajak ialah jumlah pendapatan yang didapatkan dari pembayar pajak, yang digunakan dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari serta digunakan untuk membayar kewajiban perpajakan mereka. Variabel tingkat penghasilan ini dinilai menggunakan 5 (lima) skala *likert* yang terbagi ke dalam 5 (lima) buah pernyataan. Pernyataan-pernyataan ini diadopsi dari penelitian Hernita Nur (2022) yang disesuaikan kembali untuk dijadikan kuesioner penelitian ini tanpa mengubah esensinya sama sekali. Aspek pernyataan-pernyataan yang terkait dapat dirangkum seperti:

Tabel 3. 4 Aspek Pernyataan Variabel Tingkat Penghasilan

No.	Aspek pernyataan	Referensi
1	Kesanggupan pembayar pajak untuk membayarkan PKB	Hernita Nur (2022) & Atasia Pramesthi (2022)
2	Tingkat penghasilan berpengaruh pada ketaatan	
3	Penghasilan tinggi akan meningkatkan ketaatan membayar pajak	
4	Penghasilan yang rendah membuat sulit membayar pajak	
5	Kemauan untuk tetap membayar pajak dalam segala kondisi	

3.3.4 Kualitas Pelayanan

Sudah menjadi keniscayaan manakala kualitas pelayanan yang buruk dapat menghambat pertumbuhan penerimaan pajak. Menurut Sugiyani et al. (2023), salah satu penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan

yang disuguhkan oleh fiskus atau otoritas perpajakan, yang dianggap masih kurang memadai. Padahal sebagian besar masyarakat Indonesia justru masih awam dengan tata cara dan peraturan perpajakan sehingga para wajib pajak tersebut memerlukan bimbingan dan arahan yang baik dan benar dari fiskus maupun otoritas perpajakan.

Maulin Khairunnisa (2021) dalam penelitiannya menerangkan bahwa kualitas pelayanan pajak merupakan kontribusi secara langsung yang diakomodasi oleh otoritas yang berlaku dengan standar operasional tertentu guna memberi kenyamanan dan kemudahan sehingga menimbulkan rasa senang dalam diri pembayar pajak. Selain itu pada penelitian Jerry Heriantoni (2023), dikemukakan dalam penelitiannya bahwa kualitas pelayanan pajak merujuk pada layanan yang mampu menunjukkan retensi, kepuasan, juga kenyamanan untuk pelanggan (wajib pajak).

Variabel kualitas pelayanan pajak ini diukur dalam 5 (lima) skala *likert* yang terbagi ke dalam 5 (lima) buah pernyataan. Pernyataan-pernyataan ini diadopsi dari penelitian Maulin Khairunnisa (2021) dan Jerry Heriantoni (2023) yang disesuaikan kembali untuk dijadikan kuesioner penelitian ini tanpa mengubah esensinya sama sekali. Aspek pernyataan-pernyataan yang terkait mampu disimpulkan seperti berikut:

Tabel 3. 5 Aspek Pernyataan Variabel Kualitas Pelayanan

No.	Aspek pernyataan	Referensi
1	Petugas pajak bekerja secara profesional dan memberikan kemudahan	Maulin Khairunnisa (2021) & Jerry Heriantoni (2023)
2	Petugas pajak informatif dalam memberikan layanan	

Lanjutan Tabel 3.5 Aspek Pernyataan Variabel Kualitas Pelayanan

No.	Aspek pernyataan	Referensi
3	Petugas pajak sigap dan responsif dalam mengatasi masalah atau keluhan yang timbul	
4	Sarana dan fasilitas SAMSAT nyaman dan memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak	
5	Petugas pajak memahami keinginan pembayar pajak dan memberikan perhatian	

3.3.5 Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik menurut Dinda Ayu (2020) ialah kepercayaan terhadap hukum yang berlaku, percaya terhadap politisi, serta otoritas yang berlaku seperti pemungut pajak. Kuatnya akar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah harus senantiasa dijaga. Pasalnya, rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam negara Indonesia karena kekuasaan tersebut harus bersumber dari rakyat, oleh rakyat, serta kembali kepada rakyat. Rakyat Indonesia membutuhkan perwakilan yang adil serta dapat dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan. Para pemegang kuasa yang dirasa kurang dapat menjaga amanahnya tentu akan melahirkan rasa skeptis dalam diri masyarakat sehingga mempengaruhi kemauan dan kepatuhan mereka dalam membayarkan kewajiban perpajakannya. Menurut Supriatno et al. (2023) pada penelitiannya, yang menjadi faktor utama dalam meningkatkan kepercayaan publik wajib pajak ada pada keadilan untuk menegakkan regulasi terkait pajak serta pengelolaan hasil pemungutan pajak.

Variabel kepercayaan publik ini diukur dalam 5 (lima) skala *likert* yang terbagi ke dalam 5 (lima) buah pernyataan. Pernyataan-pernyataan ini diadopsi dari penelitian Dinda Ayu Novita Sari (2020) yang disesuaikan kembali untuk

dijadikan kuesioner penelitian ini tanpa mengubah esensinya sama sekali. Aspek pernyataan-pernyataan yang terkait dapat dirangkum seperti:

Tabel 3. 6 Aspek Pernyataan Variabel Kepercayaan Publik

No.	Aspek pernyataan	Referensi
1	Otoritas pajak sudah melaksanakan tugasnya dengan baik	Dinda Ayu Novita Sari (2020)
2	Percaya bahwa pajak digunakan untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan	
3	Keuangan negara telah dikelola dengan baik dan benar	
4	Kecewa dan merasa tidak senang jika pajak disalahgunakan	
5	Percaya bahwa pajak digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat	

3.3.6 Perkembangan Infrastruktur

Kemajuan sarana dan prasarana atau infrastruktur terbukti menjadi kunci penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Menurut Aldona et al. (2021), salah satu infrastruktur yang harus sangat diperhatikan adalah jalan. Hal tersebut dipengaruhi karena jalan menjadi sarana paling penting dalam adanya pembangunan, serta menjadi jembatan antara masyarakat dengan aktivitas perekonomian. Dengan terpelihara dan berkembangnya jalan, tentunya mampu mempermudah akomodasi pembangunan dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Menurut Melgie Riyan (2019), perkembangan atau pembangunan infrastruktur sebagai sebuah rangkaian maupun upaya pertumbuhan juga perubahan terhadap sarana dan prasarana yang terencana serta dilakukan dengan sadar oleh suatu pemerintahan, bangsa, dan negara dengan tujuan pembinaan

bangsa (*nation building*). Maka dari itu, pertumbuhan pembangunan dan perekonomian akan sangat bergantung dengan pengelolaan uang pajak yang tepat sasaran.

Variabel perkembangan infrastruktur ini diukur dalam 5 (lima) skala *likert* yang terbagi ke dalam 5 (lima) buah pernyataan. Pernyataan-pernyataan ini diadopsi dari penelitian Melgie Riyan Utami (2019) yang disesuaikan kembali untuk dijadikan kuesioner penelitian ini tanpa mengubah esensinya sama sekali. Aspek pernyataan-pernyataan yang terkait mampu disimpulkan seperti berikut:

Tabel 3. 7 Aspek Pernyataan Variabel Perkembangan Infrastruktur

No.	Aspek pernyataan	Referensi
1	Tersedia sarana yang memadai yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan di Kota Yogyakarta	Melgie Riyan Utami (2019)
2	Percaya bahwa perkembangan sarana berasal dari uang pajak yang telah dibayarkan	
3	Merasa pajak yang dibayarkan menunjang kualitas hidup masyarakat melalui sarana dan prasarana yang ada	
4	Fasilitas yang ada serta pembangunan yang direncanakan menjadikan pembayar pajak merasakan lebih puas dan terdorong agar menjalankan kewajiban pajaknya.	
5	Tersedia infrastruktur yang memudahkan masyarakat melakukan perjalanan	

3.4 Analisis Statistik Variabel Penelitian

Sugiyono (2018) dalam Sugiyani et al. (2023) mengatakan terkait statistik deskriptif ialah metode yang dimanfaatkan dalam melakukan analisis informasi seperti melalui deskripsi maupun ilustrasi data yang sudah dikumpulkan apa adanya, tanpa berusaha membuat kesimpulan secara umum maupun melakukan generalisasi.

3.4.1 Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sebuah instrumen pengukur dapat menjalankan fungsinya dengan akurat. Suatu tes memiliki tingkat validitas yang tinggi jika mampu memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan pengukuran secara tepat (Fatmawati et al., 2024). Dalam penelitian ini, instrumen yang dimaksud merupakan kuesioner, yang akan dianggap valid manakala pernyataan-pernyataan di dalamnya mampu menjelaskan dengan jelas apa yang diharapkan dari kuesioner tersebut. Maka, penelitian ini menggunakan metode *pearson product moment* untuk menguji derajat ketepatannya dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$.

3.4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilaksanakan dalam penelitian untuk menentukan apakah kuesioner yang dimanfaatkan dalam pengumpulan data dapat dianggap andal atau tidak. Sebuah kuesioner dikatakan andal atau reliabel apabila respons yang ditunjukkan dari responden terhadap pernyataan-pernyataan tetap konsisten dari masa ke masa. Uji reliabilitas ini dilakukan dengan memanfaatkan *Alpha Cronbach*. Variabel dianggap reliabel serta konsisten apabila nilai *Alpha Cronbach*-nya lebih dari 0,60 (Fatmawati et al., 2024). Dalam kasus ini, pernyataan kuesioner yang menunjukkan koefisien *alpha* di atas 0,60 ($\alpha > 0{,}60$) akan dianggap reliabel.

3.5 Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali (2012) pada penelitian Sugiyani et al. (2023), uji asumsi klasik dijalankan guna menguji asumsi-asumsi yang terdapat pada pemodelan regresi linear berganda sehingga data akan mampu dianalisis lebih dalam tanpa membuahkan data secara bias. Uji asumsi klasik yang akan dilakukan dalam penelitian ini mencakup uji normalitas, uji heteroskedastisitas, juga uji multikolinearitas. Penelitian ini tidak menyertakan uji autokorelasi karena uji tersebut tidak dilakukan pada data *cross section.*

Setya Budi et al. (2024) dalam penelitiannya menerangkan, uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah ditemukan hubungan antara data dalam periode t dengan data dalam periode sebelumnya (t-1). Pada analisis regresi, seharusnya tidak ada korelasi antara observasi saat ini dan observasi sebelumnya. Namun, uji autokorelasi tidak diperlukan untuk data *cross section*, misalnya data dari kuesioner yang mana seluruh variabel diukur dengan bersamaan dalam satu waktu. Oleh karena itu, penelitian ini hanya akan melibatkan uji normalitas, uji heteroskedastisitas, serta uji multikolinearitas.

3.5.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas menurut Ghozali (2012) dalam Sugiyani et al. (2023) pengujian yang bertujuan untuk menentukan apakah variabel terikat serta variabel bebas pada model regresi memberikan kontribusi yang signifikan atau tidak. Selain itu, uji normalitas dimanfaatkan dalam memeriksa apakah distribusi data mengikuti pola normal maupun tidak (Kusumawati & Rachman, 2021). Model regresi yang sesuai dapat dinilai pada distribusi data yang mengikuti pola normal

maupun mendekati normal. Dalam penelitian ini, pengujian yang akan digunakan adalah uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov.*

3.5.2 Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan kutipan Sugiyono (2015) dalam Sugiyani et al. (2023), uji heteroskedastisitas dimanfaatkan dalam menentukan apakah adanya perbedaan variansi residual dari satu pengamatan terhadap pengamatan lainya pada model regresi. Jika variansi residual konsisten di seluruh pengamatan, kondisi ini disebut dengan homoskedastisitas. Di sisi lain, jika variansi residual bervariasi antar pengamatan, kondisi ini disebut heteroskedastisitas.

3.5.3 Uji Multikolinearitas

Berdasarkan pendapat Ghozali (2018) pada Bhegawati et al. (2022), uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa kemungkinan adanya keterkaitan antara variabel bebas pada model regresi. Uji multikolinearitas dilaksanakan dengan meninjau nilai VIF atau *variance inflation factor.*

Pada keadaan VIF lebih rendah dari 10 (VIF < 10) maupun nilai *tolerance* melebihi 0,10 (*tolerance* > 0,10) maka dapat diketahui bahwa tidak adanya gejala multikolinearitas. Di sisi lain, apabila VIF lebih tinggi dari 10 (VIF > 10) maupun nilai *tolerance* dibawah dari 0,10 (*tolerance* < 0,10) maka diketahui bahwa terdapat adanya gejala multikolinearitas (Oliviandy et al., 2021).

3.6 Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian yang mencari pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan, kualitas pelayanan, kepercayaan publik, dan perkembangan

infrastruktur terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ini memanfaatkan teknik analisis data model regresi linear berganda. Ghozali (2012) pada Sugiyani et al. (2023) mengungkapkan bahwa analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengukur dampak satu maupun lebih variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel terikat atau dependen.

Pada penelitian ini, analisis akan menggunakan bantuan *software* atau perangkat lunak SPSS 25. Rumusan model regresi linear berganda adalah seperti di bawah ini:

$$\boldsymbol{Y = \alpha + \beta 1 X1 + \beta 2 X2 + \beta 3 X3 + \beta 4 X4 + \beta 5 X5 + \beta 6 X6 + e}$$

Keterangan:

Y : Variabel dependen (terikat)

α : Konstanta

$\beta 1 - \beta 6$: Koefisien regresi

X1 : Kesadaran wajib pajak

X2 : Tingkat penghasilan

X3 : Kualitas pelayanan

X4 : Kepercayaan publik

X5 : Perkembangan infrastruktur

X6 : Tingkat pendidikan

e : Tingkat kesalahan

3.7 Pengujian Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan awal mengenai suatu masalah yang perlu diuji untuk memastikan kebenarannya. Maka, pengujian hipotesis dilakukan dengan tujuan mencari kebenaran dari pernyataan yang masih diragukan kebenarannya (Siregar et al., 2022). Peneliti umumnya menggunakan hipotesis sebagai titik permulaan dalam melakukan penelitian, kemudian para peneliti akan mengumpulkan data dan informasi yang relevan sebanyak-banyaknya sebagai bahan dalam pembuktian kebenaran hipotesis ini.

3.7.1 Uji Statistik T

Menurut Ghozali (2018) dalam Jannah & Triyanto (2021), pengujian hipotesis menggunakan uji t bertujuan sebagai penentu untuk meninjau pengaruh terhadap hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang dimanfaatkan adalah sebesar 5% ($\alpha = 0.05$). Jika terdapat suatu kondisi di mana tingkat signifikansi di bawah α *(*p *value* < 0.05), maka hipotesis akan dapat diterima. Di sisi lain, jika terdapat kondisi di mana tingkat signifikansi di atas α (p *value* > 0.05), maka hipotesis akan ditolak.

3.7.2 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dimanfaatkan dalam mengukur sejauh mana model mampu mendeskripsikan variasi dalam variabel terikat. Nilai ini diukur melalui *R-square* dan *adjusted R-square* yang berkisar antara angka 0 (nol) dan 1 (satu), yang mana semakin mendekati angka 1 (satu), maka dapat dianggap model tersebut akan semakin baik (Oliviandy et al., 2021). Hal tersebut berlaku juga

sebaliknya, jika semakin mendekati angka 0 (nol), sehingga mampu diperoleh kesimpulan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat semakin menurun.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan dengan mendistribusikan kuesioner secara langsung kepada responden, yaitu wajib pajak yang telah maupun sedang membayar kewajiban perpajakan kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kota Yogyakarta. Sebanyak 122 kuesioner berhasil dikumpulkan dengan lengkap. Data yang terkumpul berikutnya akan diolah serta dianalisis memanfaatkan perangkat lunak statistik SPSS 25.

Tabel 4. 1 Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Persentase
Total kuesioner disebar	122	100%
Kuesioner tidak kembali	0	0%
Kuesioner tidak lengkap	0	0%
Kuesioner dapat diolah	122	100%

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa dar 122 kuesioner yang dibagikan, tidak ada kuesioner yang tidak kembali maupun yang tidak lengkap. Dengan demikian, seluruh 122 kuesioner dapat diproses.

4.2 Ragam Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil distribusi kuesioner kepada 122 responden, berbagai karakteristik responden untuk penelitian ini dapat diidentifikasi seperti di bawah ini:

4.2.1 Jenis Kelamin

Tabel 4. 2 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Responden	
	Jiwa	%
Pria	75	61,5
Wanita	47	38,5
Total	**122**	**100**

Tabel 4.2 menyajikan distribusi jenis kelamin responden dalam penelitian ini. Dari total 122 responden, terdapat 75 pria, yang mencakup 61,5% dari keseluruhan populasi, sementara 47 responden atau 38,5% adalah wanita.

4.2.2 Usia

Tabel 4. 3 Usia Responden

Usia	Responden	
	Jiwa	%
20-30 tahun	51	41,8
31-40 tahun	51	41,8
>40 tahun	20	16,4
Jumlah	**122**	**100**

Tabel 4.3 menunjukkan distribusi usia responden untuk penelitian ini. Dari total 122 responden, terdapat dua kelompok usia dominan, masing-masing mencakup 51 orang atau 41,8% dari keseluruhan responden, yaitu kelompok usia 20-30 tahun dan 31-40 tahun. Ini menandakan bahwa penelitian ini didominasi oleh individu dalam rentang usia dewasa muda hingga paruh baya. Sementara itu, kelompok usia di atas 40 tahun terdiri atas 20 responden, yang setara dengan 16,4% dari total, menunjukkan bahwa bagian yang lebih kecil dari populasi responden berada di kelompok usia tersebut.

4.2.3 Pendidikan

Tabel 4. 4 Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
SD	8	6,6%
SMP	14	11,5%
SMA	47	38,5%
Diploma/Sarjana	47	38,5%
Pascasarjana	6	4,9%
Jumlah	**100**	**100%**

Tabel 4.4 membuktikan distribusi tingkat pendidikan responden untuk penelitian ini. Dari total 122 responden, Sebagian besar memiliki tingkat pendidikan dengan relatif tinggi. Sebanyak 47 responden, atau 38,5%, telah menyelesaikan pendidikan SMA, dan jumlah yang sama juga tercatat untuk responden dengan gelar Diploma/Sarjana, yang juga mencapai 38,5%. Sementara itu, 14 responden atau 11,5% memiliki pendidikan setingkat SMP, dan 8 responden, yang setara dengan 6,6%, memiliki pendidikan SD. Hanya 6 responden, atau 4,9%, yang telah menyelesaikan pendidikan Pascasarjana.

4.3 Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif dimanfaatkan dalam menghitung nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, serta deviasi standar dari data yang didapatkan pada jawaban responden. Untuk penelitian ini, analisis statistik deskriptif dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak SPSS 25, dan hasilnya seperti di bawah ini:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran	122	9	25	20.91	4.072
Penghasilan	122	11	25	20.41	3.732
Pelayanan	122	9	25	20.57	4.176
Kepercayaan	122	8	25	19.69	4.974
Infrastruktur	122	7	25	20.52	3.953
Kepatuhan	122	8	25	20.34	4.718

Sumber: Data Output SPSS, 2024

Berdasarkan tabel hasil uji statistik deskriptif yang disajikan di atas, dapat disimpulkan seperti di bawah ini:

1. Pada variabel kesadaran wajib pajak yang diuji melalui 122 responden, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata menunjukkan angka 20,91, maka tingkat kesadaran keseluruhan responden cukup tinggi. Nilai minimum ditunjukkan sebesar 9 dan nilai maksimumnya adalah 25, maka dari 122 responden dapat diketahui bahwa nilai kesadaran wajib pajak terendah yang ditunjukkan dari responden adalah sejumlah 9 serta nilai tertingginya sejumlah 25. Selanjutnya nilai standar deviasi variabel kesadaran wajib pajak ditunjukkan 4,072 dengan makna sebaran data variabel kesadaran wajib pajak adalah sejumlah 4,072.

2. Pada variabel tingkat penghasilan yang diuji melalui 122 responden, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata menunjukkan angka 20,41, maka persepsi tingkat penghasilan keseluruhan responden cukup tinggi. Nilai minimum ditunjukkan sebesar 11 dan nilai maksimumnya adalah 25, maka dari 122 responden dapat diketahui bahwa nilai persepsi tingkat penghasilan terendah yang disampaikan dari responden adalah sebesar 11 serta nilai tertingginya sejumlah 25. Selanjutnya nilai standar deviasi variabel tingkat penghasilan ditunjukkan sejumlah 3,732 dengan makna sebaran data variabel tingkat penghasilan adalah sebesar 3,732.

3. Pada variabel kualitas pelayanan yang diuji melalui 122 responden, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata menunjukkan angka 20,57, maka persepsi kualitas pelayanan keseluruhan responden cukup tinggi. Nilai minimum ditunjukkan sebesar 9 dan nilai maksimumnya adalah 25, maka dari 122 responden dapat diketahui bahwa nilai persepsi kualitas pelayanan terendah yang disampaikan dari responden adalah sebesar 9 serta untuk nilai tertingginya sejumlah 25. Selanjutnya nilai standar deviasi variabel kualitas pelayanan ditunjukkan sebesar 4,176 yang berarti sebaran data variabel kualitas pelayanan adalah sebesar 4,176.

4. Pada variabel kepercayaan publik yang diuji melalui 122 responden, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata menunjukkan angka 19,69, maka persepsi kepercayaan publik keseluruhan responden cukup tinggi. Nilai minimum ditunjukkan sebesar 8 dan nilai maksimumnya adalah 25, maka dari 122

responden dapat diketahui bahwa nilai persepsi kepercayaan publik terendah yang disampaikan dari responden adalah sebesar 8 serta untuk nilai tertingginya sejumlah 25. Selanjutnya nilai standar deviasi variabel kepercayaan publik ditunjukkan sebesar 4,974 yang berarti sebaran data variabel kepercayaan publik adalah sebesar 4,974.

5. Pada variabel perkembangan infrastruktur yang diuji melalui 122 responden, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata menunjukkan angka 20,52, maka persepsi perkembangan infrastruktur keseluruhan responden cukup tinggi. Nilai minimum ditunjukkan sebesar 7 dan nilai maksimumnya adalah 25, maka dari 122 responden dapat diketahui bahwa nilai persepsi perkembangan infrastruktur terendah yang yang disampaikan dari responden adalah sebesar 7 serta untuk nilai tertingginya sejumlah 25. Selanjutnya nilai standar deviasi variabel perkembangan infrastruktur ditunjukkan sebesar 3,953 yang berarti sebaran data variabel perkembangan infrastruktur adalah sebesar 3,953.

6. Pada variabel kepatuhan wajib pajak yang diuji melalui 122 responden, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata menunjukkan angka 20,34, maka kepatuhan wajib pajak keseluruhan responden cukup tinggi. Nilai minimum ditunjukkan sebesar 8 dan nilai maksimumnya adalah 25, maka dari 122 responden dapat diketahui bahwa nilai kepatuhan wajib pajak terendah yang ditunjukkan dari responden adalah sejumlah 8 akan tetapi untuk nilai tertingginya sejumlah 25. Selanjutnya nilai standar deviasi variabel kepatuhan wajib pajak ditunjukkan

4,718 dengan makna sebaran data variabel kepatuhan wajib pajak adalah sejumlah 4,718.

4.4 Uji Kualitas Data

4.4.1 Uji Validitas

Uji validitas pada penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana instrumen pengukur bisa melakukan fungsi ukurnya dengan tepat dan akurat. Uji validitas diterapkan pada kuesioner yang sudah dibagikan kepada 122 responden. Adapun hasilnya ditampilkan pada Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Poin 1	0,845	0,176	Valid
	Poin 2	0,914	0,176	Valid
	Poin 3	0,809	0,176	Valid
	Poin 4	0,877	0,176	Valid
	Poin 5	0,891	0,176	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	Poin 1	0,778	0,176	Valid
	Poin 2	0,845	0,176	Valid
	Poin 3	0,845	0,176	Valid
	Poin 4	0,873	0,176	Valid
	Poin 5	0,871	0,176	Valid
Tingkat Penghasilan (X2)	Poin 1	0,716	0,176	Valid
	Poin 2	0,829	0,176	Valid
	Poin 3	0,835	0,176	Valid
	Poin 4	0,648	0,176	Valid
	Poin 5	0,869	0,176	Valid
Kualitas Pelayanan (X3)	Poin 1	0,886	0,176	Valid
	Poin 2	0,872	0,176	Valid
	Poin 3	0,917	0,176	Valid
	Poin 4	0,780	0,176	Valid
	Poin 5	0,869	0,176	Valid

Lanjutan Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Kepercayaan Publik (X4)	Poin 1	0,921	0,176	Valid
	Poin 2	0,917	0,176	Valid
	Poin 3	0,893	0,176	Valid
	Poin 4	0,933	0,176	Valid
	Poin 5	0,736	0,176	Valid
Perkembangan Infrastruktur (X5)	Poin 1	0,660	0,176	Valid
	Poin 2	0,742	0,176	Valid
	Poin 3	0,852	0,176	Valid
	Poin 4	0,886	0,176	Valid
	Poin 5	0,838	0,176	Valid

Menurut Sugiyono (2016) pada penelitian Dewi & Sudaryanto (2020), sebuah indikator dalam kuesioner dinilai valid apabila nilai r hitungnya lebih tinggi dibandingkan nilai r tabel. Berdasarkan uji validitas yang telah dilakukan, seluruh item pernyataan masing-masing variabel menunjukkan nilai r hitung yang melebihi nilai r tabel (0,176). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan variabel dalam kuesioner dinyatakan valid.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Dalam suatu penelitian, uji reliabilitas dijalankan guna mengevaluasi apakah data yang diperoleh reliabel/andal atau tidak. Suatu kuesioner dinilai andal apabila jawaban dari responden pada pernyataan yang diajukan tetap konsisten maupun stabil seiring waktu. Menurut Dewi & Sudaryanto (2020), sebuah kuesioner dapat disebut andal atau reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,60. Sementara, jika nilai *Cronbach Alpha* kurang dari 0,60, maka data dianggap tidak reliabel atau tidak andal.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Koefisien	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,914	0,60	Andal
Kesadaran Wajib Pajak	0,892	0,60	Andal
Tingkat Penghasilan	0,833	0,60	Andal
Kualitas Pelayanan	0,903	0,60	Andal
Kepercayaan Publik	0,927	0,60	Andal
Perkembangan Infrastruktur	0,853	0,60	Andal

Berdasarkan Tabel 4.7 hasil uji reliabilitas, seluruh variabel menunjukkan nilai Cronbach Alpha yang lebih tinggi dari 0,60. Sehingga, dapat disimpulkan seluruh konsep pengukuran dari setiap variabel dalam kuesioner tersebut reliabel atau andal, dengan demikian item-item dalam setiap variabel tersebut dapat dipergunakan sebagai alat ukur yang layak.

4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan dalam penelitian unruk menentukan apakah distribusi data variabel bebas dan terikat mengikuti pola distribusi normal atau tidak. Menurut Mardiatmoko (2020), salah satu metode guna melakukan uji asumsi klasik normalitas yaitu dengan memanfaatkan uji *Kolmogorov-Smirnov* satu sampel. Kriteria uji ini adalah apabila nilai signifikansi *(Asymp. Sig. (2-tailed))* lebih tinggi dari 0,05, sehingga data dianggap terdistribusi normal. Sebaliknya, apabila nilai tersebut dibawah dari 0,05, maka data dianggap tidak terdistribusi normal. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan kriteria bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* harus

melebihi 0,05. Dibawah ini disajikan hasil pengujian *Kolmogorov-Smirnov* yang dilaksanakan dengan memanfaatkan *software* SPSS versi 25.

Tabel 4. 8 Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		122
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.73004375
Most Extreme Differences	Absolute	.039
	Positive	.032
	Negative	-.039
Test Statistic		.039
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

Sumber: Data Output SPSS, 2024

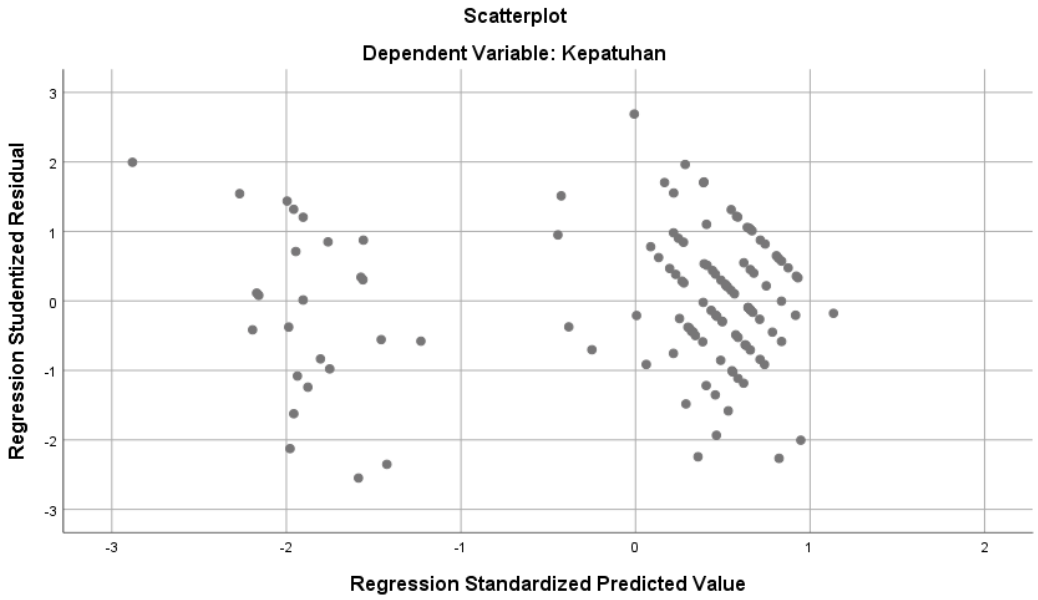
Berdasarkan data pada Tabel 4.8 *Kolmogorov-Smirnov Test*, nilai yang dihasilkan pada kolom *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah sebesar 0,200. Nilai ini melebihi batas yang ditetapkan, yaitu sebesar 0,05 (0,200 > 0,05). Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa data terdistribusi dengan normal serta model regresi ini sesuai untuk diterapkan pada penelitian ini.

4.5.2 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilaksanakan guna mengamati kemungkinan adanya ketidaksamaan varians residual antar pengamatan pada sebuah model regresi. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan memperhatikan grafik *scatterplots*. Menurut Muhidin & Situngkir (2022), kriteria yang diterapkan adalah jika titik-titik pada grafik tersebar dengan acak di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y serta tidak terfokus dan menciptakan pola

tertentu, maka dapat diperoleh kesimpulan terkait model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Di bawah ini merupakan hasil uji heteroskedastisitas yang diperoleh dari grafik *scatterplots*:

Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Scatterplots)



Sumber: Data Output SPSS, 2024

Berdasarkan grafik yang ditampilkan, diketahui bahwa titik-titik pada *scatterplots* tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, tanpa membentuk pola tertentu. Oleh karena itu, mampu diperoleh kesimpulan terkait model regresi ini tidak menunjukkan tanda-tanda heteroskedastisitas, sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

4.5.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengevaluasi apakah ditemukan adanya hubungan antar variable bebas atau independen, karena pada model regresi semestinya tidak ada korelasi antara variabel bebas. Menurut Mardiatmoko

(2020), untuk menentukan adanya gejala multikolinearitas atau tidak adalah dengan meninjau nilai *tolerance* serta *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* melebihi 0,10 (*tolerance* > 0,10) dan nilai VIF kurang dari 10 (VIF < 10), dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas. Sebaliknya, jika kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka terdapat gejala multikolinearitas. Berikut adalah hasil dari uji multikolinearitas yang telah dilakukan:

Tabel 4. 9 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel			Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,193	5,178	Tidak terdapat gejala multikolinearitas
Tingkat Penghasilan (X2)	0,304	3,290	Tidak terdapat gejala multikolinearitas
Kualitas Pelayanan (X3)	0,225	4,453	Tidak terdapat gejala multikolinearitas
Kepercayaan Publik (X4)	0,198	5,059	Tidak terdapat gejala multikolinearitas
Perkembangan Infrastruktur (X5)	0,238	4,210	Tidak terdapat gejala multikolinearitas
Tingkat Pendidikan (K)	0,672	1,488	Tidak terdapat gejala multikolinearitas

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui seluruh variabel bebas memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF yang kurang dari 10. Dengan demikian, dapat diperoleh kesimpulan bahwa tidak adanya gejala multikolinearitas pada variabel bebas atau independen dalam penelitian ini.

4.6 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan guna mengukur sejauh mana variabel bebas/independen memengaruhi variabel terikat/dependen yang pada

penelitian ini merupakan kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis regresi ditunjukkan pada tabel *coefficient* dibawah ini:

Tabel 4. 10 Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]								
Model		Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	t	Sig	Collinearity Statistic	
		B	Std Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1.986	1.041		-1.907	.059		
	Kesadaran	.363	.090	.313	4.024	.000	.193	5.178
	Penghasilan	.060	.078	.048	.767	.445	.304	3.290
	Pelayanan	.079	.082	.070	.964	.337	.225	4.453
	Kepercayaan	.329	.073	.347	4.517	.000	.198	5.059
	Infrastruktur	.261	.084	.219	3.115	.002	.238	4.210
	Pendidikan	.015	.206	.003	.072	.942	.672	1.488
a. Dependent Variable: Kepatuhan								

Sumber: Data Output SPSS, 2024

Berdasarkan pada data yang ditampilkan dalam tabel di atas, persamaan regresi linear berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = -1{,}986 + 0{,}363X1 + 0{,}060X2 + 0{,}079X3 + 0{,}329X4 + 0{,}261X5 + 0{,}015X6}$$

Keterangan:

Y : Variabel dependen (terikat)

α : Konstanta

β : Koefisien regresi

X1 : Kesadaran wajib pajak

X2 : Tingkat penghasilan

X3 : Kualitas pelayanan

X4 : Kepercayaan publik

X5 : Perkembangan infrastruktur

X6 : Tingkat pendidikan

Hasil dari persamaan regresi linear tersebut mampu diinterpretasikan seperti di bawah ini:

1. Nilai konstanta (α) ditunjukkan sebesar -1,986, membuktikan manakala variabel kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan, kualitas pelayanan, kepercayaan publik, perkembangan infrastruktur, maupun tingkat pendidikan bernilai 0 (nol), maka besarnya kepatuhan wajib pajak atau nilai Y yaitu sejumlah -1,986 satuan.
2. Koefisien untuk variabel bebas pertama, kesadaran wajib pajak adalah 0,363. Maknanya untuk setiap pertambahan 1 satuan pada kesadaran wajib pajak akan meningkatkan sebesar 0,363 pada kepatuhan wajib pajak, dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain tetap konstan.
3. Koefisien untuk variabel bebas kedua, tingkat penghasilan adalah 0,060. Ini berarti setiap peningkatan sejumlah 1 satuan untuk tingkat penghasilan wajib pajak mampu meningkatkan sebesar 0,060 dalam kepatuhan wajib pajak, dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain tetap konstan.
4. Koefisien untuk variabel bebas ketiga, kualitas pelayanan adalah 0,079. Ini dengan makna bahwa setiap peningkatan sejumlah 1 satuan pada kualitas pelayanan mampu meningkatkan sebesar 0,079 pada kepatuhan wajib pajak, dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain tetap konstan.
5. Koefisien untuk variabel bebas keempat, kepercayaan publik adalah 0,329. Hal ini bermakna bahwa setiap peningkatan sejumlah 1 satuan pada

kepercayaan publik mampu menyebabkan peningkatan sejumlah 0,329 pada kepatuhan wajib pajak, dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain tetap konstan.

6. Koefisien untuk variabel bebas kelima, perkembangan infrastruktur adalah 0,261. Hal ini dengan bermakna bahwa setiap peningkatan sejumlah 1 satuan pada perkembangan infrastruktur mampu menyebabkan peningkatan sejumlah 0,261 pada kepatuhan wajib pajak, dalam asumsi bahwa variabel bebas yang lain tetap konstan.
7. Koefisien untuk variabel kontrol tingkat pendidikan adalah 0,015. Maknanya setiap pertambahan sejumlah 1 satuan pada tingkat pendidikan mampu menyebabkan peningkatan sejumlah 0,015 pada kepatuhan wajib pajak, dalam asumsi bahwa variabel bebas yang lain tetap konstan.

4.7 Uji Statistik T

Tabel 4. 11 Hasil Uji Statistik T

Model		Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	t	Sig
		B	Std Error	Beta		
1	(Constant)	-1.986	1.041		-1.907	.059
	Kesadaran	.363	.090	.313	4.024	.000
	Penghasilan	.060	.078	.048	.767	.445
	Pelayanan	.079	.082	.070	.964	.337
	Kepercayaan	.329	.073	.347	4.517	.000
	Infrastruktur	.261	.084	.219	3.115	.002
	Pendidikan	.015	.206	.003	.072	.942

Sumber: Data Output SPSS, 2024

Dalam penelitian ini, uji statistik t akan dijalankan guna menguji hipotesis. Interpretasi hasil dari uji statistik t yang tertera dalam tabel tersebut yaitu seperti di bawah ini:

1. Hasil pengujian menunjukkan terkait koefisien regresi untuk variabel kesadaran wajib pajak adalah 0,363 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Pada tingkat signifikansi 5%, variabel ini dianggap signifikan karena 0,000 lebih rendah dibandingkan 0,05. Oleh karena itu, diperoleh kesimpulan terkait kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis pertama dapat diterima.
2. Berdasarkan hasil pengujian, koefisien regresi untuk variabel tingkat penghasilan adalah 0,060 dalam nilai signifikansi sebesar 0,445. Pada tingkat signifikansi 5%, variabel ini dianggap tidak signifikan karena 0,445 lebih besar dibandingkan 0,05. Oleh karena itu, mampu diperoleh

kesimpulan terkait tingkat penghasilan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis kedua ditolak.

3. Hasil pengujian membuktikan koefisien regresi untuk kualitas pelayanan sebesar 0,079 dalam nilai signifikansi 0,337. Pada tingkat signifikansi 5%, koefisien variabel tersebut dianggap tidak signifikan dikarenakan 0,337 lebih besar dibandingkan 0,05. Sebagai hasilnya, diperoleh kesimpulan terkait kualitas pelayanan fiskus tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis ketiga ditolak.
4. Hasil pengujian membuktikan koefisien regresi untuk kepercayaan publik sebesar 0,329 dengan nilai signifikansi 0,000. dalam tingkat signifikansi 5%, koefisien variabel ini dianggap signifikan sebab 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sebagai hasilnya, diperoleh kesimpulan terkait kepercayaan publik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis keempat diterima.
5. Hasil pengujian membuktikan koefisien regresi untuk perkembangan infrastruktur sebesar 0,261 dengan nilai signifikansi 0,002. Pada tingkat signifikansi 5%, koefisien variabel tersebut dianggap signifikan karena 0,002 lebih kecil dibandingkan 0,05. Sebagai hasilnya, diperoleh kesimpulan terkait perkembangan infrastruktur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis kelima diterima.

4.8 Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4. 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary[b]				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std Error of the Estimate
1	.930[a]	.866	.859	1.775

Sumber: Data Output SPSS, 2024

Koefisien determinasi dalam penelitian ini berfungsi untuk menilai seberapa efektif model ketika menjelaskan variasi pada variabel terikat/dependen. Kriterianya adalah semakin tinggi hasil koefisien tersebut, semakin besar kemampuan variabel bebas/independen dalam menjelaskan variabel terikat/dependen. Dalam uji ini, nilai yang digunakan untuk uji koefisien determinasi ialah nilai *adjusted R Square*.

Nilai *adjusted R Square* digunakan karena nilai ini mampu menyesuaikan jika terdapat variabel bebas yang ditambahkan dalam model. Berdasarkan perhitungan yang ditampilkan pada susunan tabel yang tersaji, nilai *adjusted R square* adalah 0,859. Oleh karena itu, diperoleh kesimpulan terkait kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan, kualitas pelayanan, kepercayaan publik, dan perkembangan infrastruktur dapat menjelaskan 85,9% dari variasi variabel dependen. Besar persentase sisanya adalah 14,1%, dipengaruhi oleh factor-faktor lain di luar penelitian yang tidak masuk pada model regresi.

4.9 Pembahasan

4.9.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama (H1), diperoleh koefisien sebesar 0,363 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang mana berada dibawah 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran pembayar pajak memberikan pengaruh positif yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis pertama pada penelitian ini diterima.

Menurut teori atribusi, sikap individu dipengaruhi dari faktor internal dan eksternal. Dalam konteks ini, kesadaran sepenuhnya mencerminkan aspek internal dari perilaku seseorang. Kesadaran seorang individu mencakup perasaan, persepsi, serta dorongan agar bertindak sesuai dengan objek tersebut. Dengan demikian, kesadaran pembayar pajak untuk membayar pajaknya menjadi hasil dari pemikiran, perasaan, dan respons positif terhadap ketentuan perpajakan tersebut.

Kesadaran perpajakan dari para pembayar pajak dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakan mereka berimplikasi pada tingkat ketaatan mereka. Pembayar pajak yang memiliki kesadaran serta pemahaman bahwa pajak merupakan salah satu sumber pemasukan esensial bagi wilayah dan negara akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi pada pembangunan. Tidak hanya itu, mereka yang menyadari bahwa penghindaran pajak dan ketidakpatuhan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan negara cenderung akan menghindari sikap tidak patuh terhadap peraturan dan kewajiban perpajakan.

Sejalan dengan penelitian Kusumawati & Rachman (2021), kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan mereka, sehingga dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak terhadap pajak kendaraan bermotor akan mendukung mereka untuk lebih patuh dan mengikuti peraturan serta kewajiban perpajakan.

4.9.2 Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis yang kedua (H2), koefisien yang diperoleh ialah 0,060 dengan tingkat signifikansi 0,445, yang lebih besar dari 0,05. Temuan tersebut membuktikan terkait tingkat penghasilan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak.

Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang disebabkan dari aspek dari dalam dan dari luar. Pada konteks penelitian ini, tingkat penghasilan wajib pajak menjadi suatu bentuk aspek eksternal yang berpengaruh terhadap keputusan seseorang dalam memenuhi tanggung jawab pajaknya. Besar kemungkinan jika seseorang dengan penghasilan rendah merasa kesulitan membayar pajak karena fokus mereka yaitu dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari terlebih dahulu. Dengan keadaan seperti ini meskipun tidak dapat dibenarkan, seseorang dengan penghasilan rendah akan memiliki alasan tersendiri untuk tidak patuh akan kewajiban dan peraturan perpajakan. Akan tetapi, seseorang dengan penghasilan tinggi pun tak menjamin patuh dengan kewajiban dan peraturan ini. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan individu dengan penghasilan besar pun memiliki jumlah pengeluaran yang cenderung tinggi juga. Menurut Akrom (2020), tinggi

pendapatan seseorang berjalan selaras atau berbanding lurus dengan pengeluaran maupun konsumsinya. Maka dari itu, seseorang dengan penghasilan tinggi pun belum tentu akan selalu menaati peraturan dan kewajiban perpajakannya karena mereka juga memiliki prioritas dalam mengeluarkan aset mereka masing-masing.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan dari Safina Fatmawati (2022) sebelumnya yang menunjukkan tingkat penghasilan memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.9.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan uji hipotesis kualitas pelayanan (H3), didapatkan koefisien sebesar 0,079 dan signifikansi sebesar 0,337, yang melebihi 0,05. Temuan ini membuktikan terkait kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayar pajak. Sebagai hasilnya untuk hipotesis ketiga pada penelitian ini ditolak.

Kualitas pelayanan yang disuguhkan fiskus pada individu pembayar pajak yang berperan layaknya pelanggan merupakan salah satu faktor eksternal menurut teori atribusi, yang akan memengaruhi seorang pembayar pajak melakukan tanggung jawabnya. Saat petugas pajak menunjukkan keramahan dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak, hal ini dapat menciptakan dorongan positif bagi mereka, menciptakan kesan dan persepsi yang baik. Kesan ini lah yang akan terus bertahan dalam diri wajib pajak yang pada setiap tahunnya harus kembali lagi guna mengulangi aktivitas yang sama. Sebaliknya, jika kesan yang diciptakan merupakan kesan negatif, seseorang akan cenderung malas dan enggan ketika diminta kembali lagi ke kantor perpajakan untuk membayar pajak.

Namun, faktor pelayanan tidak dapat menjamin bahwa wajib pajak akan selalu mematuhi kewajiban dan peraturan perpajakan. Penyebabnya ialah kualitas pelayanan yang bervariasi dan tidak konsisten. Jika berbicara mengenai layanan, hal yang memiliki andil paling besar merupakan interaksi antara dua atau lebih individu. Tidak ada yang dapat memastikan interaksi individu satu dengan yang lainnya akan sama baiknya. Sebagian wajib pajak yang berlaku layaknya konsumen dapat mendapatkan pelayanan yang prima, tetapi tidak menutup kemungkinan konsumen lainnya tidak mendapatkan pelayanan yang serupa. Akibatnya, terjadi kesenjangan dalam interaksi antara fiskus pajak dan wajib pajak, sehingga sejumlah individu tidak menerima pelayanan yang seharusnya mereka dapatkan.

Hasil ini berbeda terhadap temuan dari penelitian Bhegawati et al. (2022), yang menunjukkan terkait kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.9.4 Pengaruh Kepercayaan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasar pada uji hipotesis keempat (H4), koefisien yang dihasilkan yaitu 0,329 dengan signifikansi 0,000, yang berada dibawah 0,05. Ini membuktikan terkait kepercayaan publik memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka untuk hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima.

Menurut teori atribusi, faktor eksternal menjadi kunci dari setiap perbuatan seseorang karena setiap pengaruh dari luar dapat membentuk persepsi yang kemudian memengaruhi keputusan dan tindakannya. Dalam penelitian ini

kepercayaan publik menjadi suatu aspek yang berkontribusi pada ketaatan pajak individu. Pada kondisi di mana pembayar pajak memiliki kepercayaan yang baik pada institusi pemerintahan, mereka akan dengan senang hati mempercayakan sebagian harta mereka dikelola dan digunakan untuk kepentingan bersama, dengan asumsi aset yang mereka relakan akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta para pembayar pajak juga akan merasakan manfaatnya kelak. Sebaliknya, jika rakyat yang sebagai pembayar pajak merasa terdapat suatu hal yang salah dalam pemerintahan seperti tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), kepercayaan mereka akan luntur dan semakin timbul alasan untuk tidak membayar pajak karena persepsi buruk ini.

Hasil ini sejalan terhadap temuan Supriatno et al. (2023), yang mengungkapkan terkait kepercayaan publik memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, kepercayaan yang kuat dari para wajib pajak mampu mendorong mereka untuk lebih mematuhi peraturan serta kewajiban perpajakan.

4.9.5 Pengaruh Perkembangan Infrastruktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis kelima (H5), koefisien yang dihasilkan adalah 0,261 dengan signifikansi 0,002, yang lebih kecil dibandingkan 0,05. Ini membuktikan terkait perkembangan infrastruktur memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis kelima dalam penelitian ini diterima.

Infrastruktur atau sarana dan prasarana merupakan bentuk dari struktur fisik yang berupa fasilitas dasar yang dibutuhkan masyarakat untuk mendukung kehidupan sehari-hari hingga aktivitas ekonomi. Sarana ini mencakup layanan dan fasilitas yang memungkinkan suatu negara untuk berfungsi secara efisien dan efektif, dan tentunya masyarakat menginginkan sarana yang baik dan berkembang dari waktu ke waktu. Menurut teori atribusi, hal ini merupakan salah satu determinan yang berasal dari luar yang memengaruhi kewajiban seorang wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan.

Meningkat dan terpeliharanya infrastruktur tentu dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat melalui kemudahan akses terhadap layanan publik, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, hal tersebut merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah maupun otoritas perpajakan dalam mengemban tugasnya. Persepsi yang akan timbul adalah uang pajak yang telah dikumpulkan benar-benar digunakan untuk membangun daerah dan negara. Ketika masyarakat merasa yakin dan merasakan utilitas langsung melalui hasil pajak yang mereka bayar, ketaatan wajib pajak cenderung akan meningkat.

Hasil tersebut selaras dengan temuan Wardana (2017), yang menyatakan terkait perkembangan infrastruktur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, infrastruktur yang baik juga terencana dapat menstimulasi ketaatan individu agar lebih patuh terhadap peraturan dan kewajiban perpajakan mereka.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada berbagai analisis yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan pengaruh positif yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini mengimplikasikan bahwa meningkatnya kesadaran individu atau wajib pajak akan memupuk tingkat kepatuhan perpajakan individu tersebut pula.
2. Variabel tingkat penghasilan dalam penelitian ini menunjukkan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Ini mengindikasikan bahwa tidak ditemukan pengaruh yang signifikan antara tingkat penghasilan dan kepatuhan wajib pajak.
3. Variabel kualitas pelayanan dalam penelitian ini menunjukkan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini mengingikasikan bahwasanya tidak terdapat hubungan signifikan antara kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak.
4. Variabel kepercayaan publik pada penelitian ini memiliki pengaruh positif yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini menunjukkan bahwasanya semakin besar tingkat kepercayaan individu/wajib pajak terhadap institusi pemerintah serta otoritas

perpajakan, semakin tinggi pula kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan.

5. Variabel perkembangan infrastruktur dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh positif yang signifikan pada patuhnya wajib pajak kendaraan bermotor. Ini berarti semakin baik dan terencana perkembangan infrastruktur, semakin besar dampaknya terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya mengandalkan kuesioner untuk menghimpun data yang akan diolah. Data yang hanya dikumpulkan melalui kuesioner memiliki beberapa kelemahan seperti jawaban responden yang tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan responden, selain itu juga responden dapat mengisi kuesioner secara acak karena beberapa alasan tertentu.

5.3 Saran

Saran yang dapat dibagikan oleh penulis untuk peneliti-peneliti di masa mendatang dengan mempertimbangkan keterbatasan penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian mendatang diharapkan dapat mempergunakan alternatif metode lain dalam mengumpulkan data sehingga tidak hanya memanfaatkan kuesioner, misalnya melakukan wawancara secara langsung agar hasil yang diperoleh lebih objektif juga lebih tidak bias.
2. Penelitian mendatang dapat mempertimbangkan variabel-variabel lain untuk mengeksplorasi determinan lain yang berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak, misalnya biaya kepatuhan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan.

3. Penelitian berikutnya diharapkan mampu meningkatkan cakupan dengan menggunakan sampel secara lebih besar, sehingga data yang dikumpulkan lebih kuat dan akurat dan dapat mengurangi potensi kesalahan.

5.4 Implikasi

Hasil dari penelitian ini mengenai kepatuhan wajib pajak ini menunjukkan bahwa determinan yang terbukti berpengaruh secara signifikan adalah kesadaran wajib pajak, kepercayaan publik, dan perkembangan infrastruktur. Hasil ini dapat memberikan masukan pada pemerintah atau instansi yang terkait untuk mempertimbangkan faktor-faktor tersebut guna memupuk kepatuhan dari pembayar pajak kendaraan bermotor karena melalui hal tersebut, maka penerimaan pajaknya akan meningkat pula.

Sedangkan determinan lainnya seperti tingkat penghasilan dan kualitas pelayanan tidak memberikan pengaruh yang signifikan, tetapi tetap berada dalam arah yang positif. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua determinan tersebut tetap dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Diharapkan penelitian ini mampu berguna bagi pemerintah guna menjaga stabilitas penerimaan pajaknya karena melalui penerimaan pajak inilah, pendapatan asli daerah dapat terjaga pula.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, F. salam. (2022). Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, *11*(1), 1–18. https://doi.org/10.29244/jekp.11.1.2022.1-18

Akrom, H. M. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Rumah Tangga di Jawa Timur. *Jurnal FEB Brawijaya*, *112*.

Aldona, Y., Primandhana, W. P., & Wahed, M. (2021). Analisis Pengaruh Infrastruktur Listrik, Jalan Dan Kesehatan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Kabupaten Sidoarjo. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *12*(1), 54. https://doi.org/10.33087/eksis.v12i1.223

Amat, A. (2021). Pertumbuhan, Perkembangan Dan Kematangan Individu. *Jurnal Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial*, *12*(1), 59–75.https://doi.org/ 10.20414/society.v12i1.2751

Ananda, A. (2024). The influence of tax innovation, taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanction, quality of fiscal services and trust in government on taxpayer compliance pbb-p2. *Journal of Economic, Business, and Accounting (COSTING)*, *7*. https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10074

Anggraeni, F. N. (2021). *Analysis Of User Satisfaction Of Public Transportation Ojek Online (Gojek) Through*. *Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, *1*(2), 77–86. https://doi.org/ 10.37481/jmeb.v1i2.221

Antika, F. N., Mulyani, S., & Budiman, N. A. (2021). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm di Kabupaten Kudus. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, *16*(1), 15–28. https://doi.org/10.37301/jkaa.v16i1.32

Banerjee, A., Duflo, E., & Qian, N. (2020). On the road: Access to transportation infrastructure and economic growth in China. *Journal of Development Economics*, *145* (May 2018), 102442. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco. 2020.102442

Bani-Khalid, T., Alshira'h, A. F., & Alshirah, M. H. (2022). Determinants of Tax Compliance Intention among Jordanian SMEs: A Focus on the Theory of Planned Behavior. *Journals of Economies*, *10*(2), 1–20.https://doi.org/ 10.3390/ economies10020030

Beshi, T. D., & Kaur, R. (2020). Confiança Pública no Governo Local: Explicando o Papel das Boas Práticas de Governança. *Journal of Public Organization Review*, *20*(2), 337–350. https://doi.org/10.1007/s11115-019-00444-6

Bhegawati, D. A. S., Yuesti, A., & Sumiantari, N. W. (2022). Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar. *Asian Journal of Management Analytics*, *1*(1), 35–50. https://doi.org/10.55927/ajma.v1i1.1393

Dewi, S. K., & Sudaryanto, A. (2020). Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Pengetahuan , Sikap dan Perilaku Pencegahan Demam Berdarah. *Prosiding Seminar Nasional Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta (SEMNASKEP) 2020*, 73–79.

Fatmasari, R. R., Yolistina, A., Nindya, N., & Hanuun, P. (2023). Utilization of Chatgpt in the Context of Tax Education in Indonesia: a Perspective Review. *Journal of Kisa Institute*, *1*(1).

Fatmawati, R., Wita, P., & Waluyo, M. (2024). Analisis Kepuasan Pelayanan PT. SAK Dengan Metode Uji Validitas dan Reliabilitas. *Jupiter: Jurnal Publikasi Ilmu Keteknikan Industri, Teknik Elektro, dan Informatika*, *2*(1), 253–261. https://doi.org/10.61132/jupiter.v2i1.80

Firmansyah, D., & Dede. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, *1*(2), 85–114. https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937

Goma, E. I., Sandy, A. T., & Zakaria, M. (2021). Analisis Distribusi dan Interpretasi Data Penduduk Usia Produktif Indonesia Tahun 2020. *Jurnal Georafflesia: Artikel Ilmiah Pendidikan Geografi*, *6*(1), 20.https://doi.org/10.32663/georaf.v6i1.1781

Halomoan, K., & Herning Sitabuana, T. (2022). PAJAK, PANDEMI, DAN MASYARAKAT. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, *1*(7), 1243–1254. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.147

Hamidi, R., & Rivandi, M. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Padang Pariaman. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, *1(2)*(2), 297-309.https://doi.org/10.55606/jumia.v1i2.1302

Indaswari, P. C., Adnyana, I. N. K., & Sudiartana, I. M. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkatkepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *Universitas Mahasaraswati Denpasar Journal of Accounting*, *1*(1), 1–8.

Jannah, A. N., & Triyanto, E. (2021). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Berbasis E- Commerce Pada Umkm. *Jurnal Akuntansi*, *1*(1), 8–15. https://doi.org/10.37058/jak.v1i1.2800

Kusumawati, I. N., & Rachman, A. N. (2021). Analisa Pengaruh Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Ekonomi-Qu*, *11*(1), 1–20. https://dx.doi.org/10.35448/jequ.v11i1.11272

Lestari, D. M. D., & Ngurah Agung Kresnandra, A. A. (2023). Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT. *E-Jurnal Akuntansi*, *33*(6), 1673. https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i06.p019

Lisa, O., & Hermanto, B. (2021). The Effect of Tax Amnesty and Taxpayer Awareness to Taxpayer Compliance with Financial Condition as Intervening Variable. *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences Available Online*, *5*(2), 227–236.

Liu, Y. (2024). Public trust and collaborative governance: an instrumental variable approach. *Journal of Public Management Review*, *26*(2), 421–442. https://doi.org/10.1080/14719037.2022.2095003

Mardiatmoko, G. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, *14*(3), 333–342. https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342

Maretanidanini, S. T., Wicaksana, R., Tsabita, Z. A., & Firmansyah, A. (2023). Potensi Kepatuhan Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi. *Jurnal Educoretax*, *3*(1), 42–55. https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i1.372

Muhidin, M., & Situngkir, T. L. (2022). Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2015 - 2021. *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management*, *3*(1), 15–27. https://doi.org/10.47467/manageria.v3i1.2093

Oliviandy, N. A., Astuti, T. P., & Siddiq, F. R. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Wahana Riset Akuntansi*, *9*(2), 91. https://doi.org/10.24036/ wra.v9i2.112026

Oluba Ojo, L. (2020). Advance Journal of Financial Innovation and Reporting IMPACT OF TAX ADMINISTRATION ON GOVERNMENT REVENUE IN DEVELOPING ECONOMY: A CASE STUDY OF NIGERIA Advance Journal of Financial Innovation and Reporting. *Advance Journal of Financial Innovation and Reporting*, *4*(04).

Prasetyo, E. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Kab Kediri). *Ekuvalensi: Jurnal Ekonomi Bisnis*, *6*(2), 357–376.

Prastyatini, S. L. Y., & Gala, A. E. (2023). The Role of Income Level in Predicting Taxpayer Compliance: The Attribution Theory and Technology Acceptance Model Approach. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah Dan Audit*, *10*(2), 77–90. https://doi.org/10.12928/jreksa.v10i2.7806

Rikayana, H. L., & Nurhasanah. (2020). The Effect of Hotel Tax, Restaurant Tax, Eentertaiment Tax and The Number of Tourists on Locally-Generated Revenue at Bintan Districts. *Journal of Business, Management, and Accounting*, *2*(2), 239–250

Rosa, Y. Del, Sovita, I., & Abdilla, M. (2020). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, *22*(2), 358–369. https://doi.org/10.47233/jebd.v22i2.141

Safina Fatmawati, S. W. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaran Bermotor. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis E-Qien*, *11*(1), 883–89909. https://doi.org/10.34308/eqien.v11i1.800

Sakura, G. A., & Rachman, A. N. (2021). Analisa Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Wonogiri. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, *5*(1), 54. https://doi.org/10.25273/inventory.v5i1.8614

Salsabila, H., Handayani, D., & Heriyanto, R. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Gender, Jenis Pekerjaan, dan Tingkat Pendidikan. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, *17*(2), 1–16.https://doi.org/10.30630/jam.v17i2.191

Setya Budi, A. D. A., Septiana, L., & Panji Mahendra, B. E. (2024). Memahami Asumsi Klasik dalam Analisis Statistik: Sebuah Kajian Mendalam tentang Multikolinearitas, Heterokedastisitas, dan Autokorelasi dalam Penelitian. *Jurnal Multidisiplin West Science*, *3*(01), 01–11. https://doi.org/10.58812/jmws.v3i01.878

Setyawan, E. B. (2022). Analisa Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 – 2020. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, *2*(2), 307–316. https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i2.468

Siregar, H. D., Wassalwa, M., Khairina Janani, & Harahap, I. S. (2022). Analisis Uji Hipotesis Penelitian Perbandingan Menggunakan Statistik Parametrika. *Al Itihadu Jurnal Pendidikan*, *1*(1), 3.

Sisi, & Wage, S. (2023). Analisis Determinan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam. *SEIKO : Journal of Management & Business*, *6*(1), 152–166. https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i1.4321

Sudrajat, A. R. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Publik Bagaimana Pengaruh Terhadap Kinerja Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Education and Development*, *9*(4), 395–402.

Sugiyani, F., Ningsih, S., & Dewi, M. W. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Denda Pajak, Dan Penerapan Sistem Sakpole Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Samsat Kota Surakart. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, *23*(02), 1–11. http://dx.doi.org/10.29040/jap.v23i2.6048

Supriatno, D., Oktavia, N. D., & Dharma, T. Y. (2023). Pengaruh Tax Morale (Pemahaman Aturan Pajak, Kepercayaan Pada Pemerintah, Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Kota Pontianak. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, *7*(2), 114–123. https://doi.org/10.25139/jaap.v7i2.6395

Uzunali, E., Oğuz, Y., Olca, V., Dağ, M., Kumaş, K., & Güngör, A. (2021). Tax Awareness and Morality in the Effectiveness of Tax Revenues: Secondary School Teachers' Tax Perception Analysis in Manavgat, Antalya. *Journal of Sosyoekonomi*, *29*(50), 131–147. https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.04.07

Wardana, A. B. (2017). The impact of basic infrastructure on tax effort: A case study of municipalities/regencies in Indonesia. *International Institute of Social Studies Erasmus*, *November*.

Wibawa, H. W., Ali, H. M., Akuntansi, P., Ekonomi, F., Swadaya, S., Digantara, U., & Suryadarma, M. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan UMKM. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting, and Research, 5*(3), 650–660.https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i3. 483

Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, *7*(1), 57–76. https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner

Identitas Responden

Mohon diisi semua pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda (X) pada jawaban yang paling sesuai.

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
    - Pria
    - Wanita
3. Usia :
    - 20 – 30 Tahun
    - 31 – 40 Tahun
    - > 40 Tahun
4. Pendidikan :
    - SD Sederajat
    - SMP Sederajat
    - SMA Sederajat
    - Diploma/Sarjana
    - Pascasarjana

Keterangan:
1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
2 = Tidak Setuju (TS)
3 = Netral (N)
4 = Setuju (S)
5 = Sangat Setuju (SS)

Saudara diperkenankan menjawab Netral (N) apabila saudara benar-benar tidak mengerti dengan pernyataan yang dimaksud.

Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya membayar pajak sebagai pemenuhan kewajiban kepada negara					
2	Saya membayar pajak tepat pada waktunya					
3	Saya selalu melengkapi data dan berkas sesuai ketentuan dalam membayar pajak					
4	Saya membayar pajak tanpa mendapat paksaan dari pihak mana pun					
5	Saya malu jika mendapat denda atau sanksi pajak					

Kesadaran Wajib Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya menyadari bahwa terdapat undang-undang yang mengatur tentang perpajakan					
2	Saya menyadari bahwa membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara					
3	Saya menyadari bahwa membayar pajak merupakan sebuah bentuk tanggung jawab saya sebagai warga negara					
4	Saya menyadari bahwa manfaat dari pajak yang saya bayarkan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat					
5	Saya menyadari penundaan membayar pajak dapat merugikan daerah					

Tingkat Penghasilan

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya sanggup membayar pajak kendaraan bermotor saya					
2	Saya merasa tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh besar pada kepatuhan wajib pajak					
3	Saya merasa dengan penghasilan yang tinggi maka akan semakin taat membayar pajak					
4	Sulit bagi saya untuk membayar pajak jika penghasilan saya rendah					
5	Saya akan taat membayar pajak meskipun pendapatan saya rendah					

Kualitas Pelayanan

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya merasa petugas pajak bekerja secara profesional sehingga memudahkan saya dalam membayar pajak					
2	Saya merasa petugas pajak memberi informasi yang jelas dan mudah dimengerti ketika saya bertanya					
3	Saya merasa petugas pajak cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan persoalan yang saya hadapi					
4	Saya merasa fasilitas SAMSAT nyaman sehingga memudahkan dan membuat saya senang dalam membayar pajak					

5	Saya merasa petugas pajak memahami keinginan pelanggan dengan memberikan perhatian secara ikhlas kepada setiap pelanggan					

Kepercayaan Publik

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya merasa petugas dan otoritas perpajakan telah melaksanakan tugasnya dengan baik					
2	Saya percaya bahwa pajak digunakan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah					
3	Saya percaya bahwa keuangan negara telah dikelola secara tertib, efisien, dan bertanggung jawab					
4	Saya percaya bahwa pajak yang saya bayar benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat daerah					
5	Saya merasa kecewa dan jera apabila pajak yang saya bayarkan disalahgunakan					

Perkembangan Infrastruktur

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Sudah tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan di Kota Yogyakarta					
2	Sudah tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat melakukan perjalanan di Kota Yogyakarta					
3	Saya percaya pembangunan sarana pendukung kendaraan bermotor					

	berasal dari pajak yang saya bayarkan					
4	Saya percaya pajak yang saya bayarkan turut menunjang kesejahteraan masyarakat melalui sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah					
5	Sarana yang telah tersedia dan rencana pembangunan oleh pemerintah membuat saya senang dalam membayar pajak					

Lampiran 2 Jawaban Kuesioner

Kepatuhan Wajib Pajak

	Kepatuhan Wajib Pajak					
No	1	2	3	4	5	Mean
1	5	5	5	4	3	4.4
2	4	4	5	5	4	4.4
3	5	4	5	3	4	4.2
4	3	2	4	2	2	2.6
5	5	5	5	5	4	4.8
6	4	3	4	4	3	3.6
7	2	1	3	2	2	2
8	5	3	5	4	4	4.2
9	5	5	5	5	3	4.6
10	4	5	4	5	5	4.6
11	5	2	4	4	3	3.6
12	2	2	2	2	3	2.2
13	4	4	3	4	4	3.8
14	5	4	5	5	4	4.6
15	4	4	3	5	4	4
16	4	4	5	5	4	4.4
17	2	2	2	1	2	1.8
18	5	5	5	3	4	4.4
19	4	5	5	3	5	4.4
20	4	4	5	3	4	4
21	4	4	5	4	4	4.2
22	4	5	5	2	4	4
23	2	4	4	4	4	3.6
24	2	2	1	3	2	2
25	5	5	5	5	5	5
26	4	2	4	2	2	2.8
27	4	5	5	5	5	4.8
28	5	4	5	5	4	4.6
29	5	4	5	3	4	4.2
30	3	4	4	5	4	4
31	4	5	5	5	4	4.6
32	4	2	4	3	2	3
33	4	5	5	4	5	4.6
34	4	2	4	2	2	2.8
35	5	5	5	5	5	5
36	4	5	4	4	4	4.2
37	4	4	4	4	3	3.8
38	2	2	4	3	2	2.6
39	4	4	5	5	2	4
40	5	5	4	3	4	4.2
41	4	4	4	5	4	4.2
42	2	2	4	2	2	2.4
43	3	2	4	1	1	2.2

44	5	5	5	5	5	5
45	4	4	4	5	4	4.2
46	5	4	5	5	4	4.6
47	1	2	3	2	2	2
48	5	5	5	4	4	4.6
49	2	2	3	1	1	1.8
50	4	4	5	4	4	4.2
51	4	4	5	4	4	4.2
52	4	5	5	5	5	4.8
53	4	2	4	2	2	2.8
54	5	5	5	4	3	4.4
55	4	4	4	5	4	4.2
56	5	5	5	5	5	5
57	4	3	3	2	2	2.8
58	4	5	5	4	4	4.4
59	5	5	5	5	5	5
60	4	4	5	4	4	4.2
61	5	5	5	5	5	5
62	4	2	4	2	2	2.8
63	5	5	5	5	3	4.6
64	4	5	4	4	5	4.4
65	4	4	5	4	3	4
66	5	3	5	5	4	4.4
67	2	2	2	1	1	1.6
68	4	5	5	5	3	4.4
69	4	4	5	4	4	4.2
70	5	5	5	4	4	4.6
71	4	2	4	2	2	2.8
72	5	5	5	5	5	5
73	5	5	5	3	4	4.4
74	4	4	4	4	4	4
75	5	5	5	5	5	5
76	5	5	5	4	4	4.6
77	3	2	3	1	2	2.2
78	5	5	5	4	5	4.8
79	4	4	4	4	3	3.8
80	5	5	5	4	3	4.4
81	2	2	4	1	2	2.2
82	5	5	5	5	4	4.8
83	5	4	5	5	5	4.8
84	5	5	4	4	4	4.4
85	5	5	5	3	5	4.6
86	2	1	4	2	2	2.2
87	4	4	5	5	5	4.6
88	5	4	5	3	5	4.4
89	4	4	5	4	4	4.2
90	5	5	5	5	5	5
91	3	2	4	2	2	2.6
92	5	5	5	5	5	5

93	5	3	5	5	5	4.6
94	5	5	5	5	5	5
95	2	1	4	1	2	2
96	5	4	5	4	4	4.4
97	5	5	5	5	5	5
98	4	2	4	2	2	2.8
99	3	5	5	5	4	4.4
100	5	5	5	5	5	25
101	4	5	5	5	4	23
102	5	5	4	5	5	24
103	5	5	5	5	5	25
104	4	5	5	5	4	23
105	4	5	5	4	5	23
106	2	2	3	2	2	11
107	5	5	5	5	5	25
108	4	4	5	5	4	22
109	5	5	5	5	3	23
110	5	5	5	5	5	25
111	5	5	5	4	4	23
112	5	5	5	3	4	22
113	5	4	5	5	3	22
114	5	5	5	5	4	24
115	4	5	5	4	5	23
116	5	5	5	4	4	23
117	5	5	5	5	5	25
118	5	5	5	5	5	25
119	5	4	5	4	5	23
120	5	4	5	5	5	24
121	5	5	5	5	5	25
122	5	5	5	5	5	25

Kesadaran Wajib Pajak

	Kesadaran Wajib Pajak (X1)					
No	1	2	3	4	5	Mean
1	4	5	5	5	4	4.6
2	5	5	5	5	4	4.8
3	4	4	4	5	4	4.2
4	3	4	4	3	2	3.2
5	5	5	5	5	5	5
6	4	4	4	5	3	4
7	3	4	3	4	2	3.2
8	5	5	5	4	3	4.4
9	4	5	5	5	4	4.6
10	5	5	5	5	4	4.8
11	5	5	5	5	3	4.6
12	2	4	4	2	1	2.6
13	5	5	4	4	4	4.4
14	5	5	5	5	4	4.8

15	5	5	5	5	4	4.8
16	4	4	4	5	4	4.2
17	4	3	4	4	2	3.4
18	5	5	5	4	4	4.6
19	4	4	5	5	5	4.6
20	3	5	5	4	4	4.2
21	2	4	4	4	3	3.4
22	4	4	4	3	4	3.8
23	3	4	5	4	4	4
24	3	4	4	2	2	3
25	5	5	5	5	5	5
26	3	4	4	1	2	2.8
27	2	5	4	4	4	3.8
28	5	5	5	4	4	4.6
29	3	5	5	5	4	4.4
30	5	5	5	5	3	4.6
31	5	5	5	4	3	4.4
32	2	4	4	3	2	3
33	4	5	5	5	3	4.4
34	3	2	2	2	2	2.2
35	5	5	5	5	5	5
36	5	5	4	5	4	4.6
37	4	5	5	3	5	4.4
38	3	4	4	2	2	3
39	4	5	4	5	5	4.6
40	3	5	5	5	4	4.4
41	5	5	5	5	5	5
42	3	4	4	3	2	3.2
43	3	2	3	2	1	2.2
44	5	5	5	5	5	5
45	4	5	5	4	3	4.2
46	4	5	5	5	5	4.8
47	3	2	3	2	2	2.4
48	5	5	5	5	5	5
49	3	2	2	3	3	2.6
50	4	5	5	5	5	4.8
51	5	4	4	4	4	4.2
52	5	5	5	5	5	5
53	2	4	3	2	2	2.6
54	3	5	5	5	4	4.4
55	4	5	5	5	4	4.6
56	5	5	5	5	5	5
57	2	4	4	4	2	3.2
58	5	5	5	4	5	4.8
59	5	5	5	5	5	5
60	4	4	4	5	4	4.2
61	5	5	5	5	4	4.8
62	4	4	4	5	3	4
63	5	4	5	5	4	4.6

64	4	5	5	5	5	4.8
65	5	4	4	4	4	4.2
66	4	5	5	4	4	4.4
67	3	2	3	4	2	2.8
68	5	5	5	5	2	4.4
69	4	4	4	5	5	4.4
70	5	5	4	5	4	4.6
71	2	4	4	2	1	2.6
72	3	4	5	4	4	4
73	5	4	4	4	4	4.2
74	3	4	5	5	5	4.4
75	5	5	5	5	5	5
76	5	5	5	5	5	5
77	2	2	3	2	2	2.2
78	5	5	5	3	4	4.4
79	5	4	4	4	4	4.2
80	4	5	4	5	4	4.4
81	3	4	4	2	2	3
82	5	5	5	5	5	5
83	4	4	4	4	4	4
84	4	5	4	5	5	4.6
85	5	4	4	4	4	4.2
86	3	2	2	1	1	1.8
87	5	5	4	5	4	4.6
88	5	5	5	5	3	4.6
89	4	5	5	5	4	4.6
90	3	4	5	5	4	4.2
91	2	3	3	2	2	2.4
92	5	4	4	5	4	4.4
93	5	4	5	5	4	4.6
94	5	5	5	5	5	5
95	3	3	2	2	2	2.4
96	4	4	5	4	5	4.4
97	5	5	5	5	4	4.8
98	4	3	3	2	2	2.8
99	5	5	5	5	4	4.8
100	5	5	5	3	4	4.4
101	5	5	5	4	5	4.8
102	5	5	5	4	5	4.8
103	5	5	5	4	4	4.6
104	5	5	5	4	3	4.4
105	5	4	4	5	5	4.6
106	3	2	2	2	2	2.2
107	4	5	5	4	5	4.6
108	4	4	5	5	5	4.6
109	4	5	5	5	5	4.8
110	5	5	5	5	5	5
111	4	4	5	5	5	4.6
112	4	5	5	5	4	4.6

113	5	5	4	5	4	4.6
114	4	5	4	5	5	4.6
115	5	5	5	5	5	5
116	4	4	4	4	4	4
117	4	5	5	5	5	4.8
118	5	5	5	5	4	4.8
119	5	5	5	4	4	4.6
120	4	4	4	4	4	4
121	5	4	5	5	4	4.6
122	5	5	5	5	5	5

Tingkat Penghasilan

	Tingkat Penghasilan (X2)					
No	1	2	3	4	5	Mean
1	5	5	5	4	3	4.4
2	4	3	4	4	3	3.6
3	4	5	5	5	5	4.8
4	4	4	2	4	2	3.2
5	5	3	4	5	5	4.4
6	3	4	4	5	4	4
7	4	3	4	4	1	3.2
8	4	5	4	5	4	4.4
9	5	5	4	5	4	4.6
10	4	5	5	5	3	4.4
11	5	5	4	4	2	4
12	2	3	2	4	1	2.4
13	5	5	5	5	4	4.8
14	4	2	4	4	2	3.2
15	4	5	5	5	3	4.4
16	3	4	5	5	4	4.2
17	2	4	4	5	1	3.2
18	4	5	5	5	4	4.6
19	5	3	4	4	2	3.6
20	4	3	4	4	2	3.4
21	4	3	4	5	2	3.6
22	4	4	5	5	3	4.2
23	4	4	4	4	3	3.8
24	2	4	4	5	2	3.4
25	4	4	5	4	3	4
26	3	2	2	4	1	2.4
27	4	5	5	5	4	4.6
28	5	4	5	5	5	4.8
29	4	4	4	5	4	4.2
30	5	5	3	5	4	4.4
31	5	4	4	5	4	4.4
32	4	4	4	5	2	3.8
33	5	5	5	5	4	4.8
34	4	4	2	4	2	3.2

35	5	3	4	5	4	4.2
36	5	5	5	5	5	5
37	4	5	5	5	2	4.2
38	4	3	3	5	2	3.4
39	5	5	5	5	4	4.8
40	4	4	5	5	3	4.2
41	5	3	2	4	2	3.2
42	2	4	4	4	1	3
43	4	4	4	4	3	3.8
44	5	4	4	5	5	4.6
45	4	4	4	4	4	4
46	5	5	5	5	5	5
47	2	4	4	4	2	3.2
48	5	4	4	5	4	4.4
49	2	4	4	4	2	3.2
50	5	3	4	5	4	4.2
51	4	5	4	5	3	4.2
52	5	5	5	5	5	5
53	4	2	3	4	1	2.8
54	4	5	4	5	4	4.4
55	5	5	5	5	5	5
56	5	5	5	4	3	4.4
57	2	3	4	4	1	2.8
58	4	4	4	5	4	4.2
59	5	5	5	5	5	5
60	4	5	4	4	3	4
61	4	5	5	5	4	4.6
62	4	2	2	5	2	3
63	4	4	4	5	4	4.2
64	3	3	3	5	4	3.6
65	4	5	4	5	3	4.2
66	5	4	5	5	5	4.8
67	3	2	2	4	2	2.6
68	4	3	4	2	2	3
69	5	5	5	5	5	5
70	4	4	4	5	2	3.8
71	4	2	2	4	1	2.6
72	5	5	5	5	2	4.4
73	5	5	5	5	5	5
74	5	4	5	5	2	4.2
75	5	5	5	5	4	4.8
76	5	3	4	5	2	3.8
77	3	2	2	3	1	2.2
78	4	5	5	5	5	4.8
79	4	4	4	4	4	4
80	5	5	4	5	5	4.8
81	3	2	2	4	2	2.6
82	5	3	4	5	4	4.2
83	5	5	5	5	5	5

84	5	5	3	5	4	4.4
85	5	5	5	5	5	5
86	3	2	2	3	2	2.4
87	4	4	4	5	2	3.8
88	5	5	5	4	5	4.8
89	5	5	5	5	5	5
90	4	4	4	5	3	4
91	3	3	2	4	1	2.6
92	5	5	5	5	3	4.6
93	4	4	4	4	4	4
94	5	3	4	4	2	3.6
95	3	3	2	4	1	2.6
96	5	5	5	5	3	4.6
97	4	4	4	5	2	3.8
98	4	2	2	3	2	2.6
99	3	5	5	5	3	4.2
100	4	4	3	5	3	3.8
101	5	4	5	4	4	4.4
102	5	5	4	5	5	4.8
103	5	5	5	4	5	4.8
104	5	4	4	5	4	4.4
105	4	4	4	5	3	4
106	4	4	4	4	2	3.6
107	5	5	5	5	4	4.8
108	5	5	5	5	3	4.6
109	5	5	4	4	3	4.2
110	5	5	5	5	2	4.4
111	4	5	4	4	4	4.2
112	5	3	5	5	4	4.4
113	5	5	5	5	5	5
114	5	5	5	5	5	5
115	4	5	5	5	5	4.8
116	5	5	5	5	5	5
117	5	4	5	4	5	4.6
118	5	5	5	5	5	5
119	4	3	3	4	4	3.6
120	5	5	5	4	5	4.8
121	5	5	5	5	5	5
122	5	5	5	5	5	5

Kualitas Pelayanan

	Kualitas Pelayanan (X3)					
No	1	2	3	4	5	Mean
1	5	5	4	3	4	4.2
2	4	4	5	4	5	4.4
3	4	4	5	4	5	4.4
4	4	4	4	2	4	3.6
5	5	5	5	3	5	4.6

6	5	5	4	2	4	4
7	4	4	3	2	4	3.4
8	5	5	5	4	5	4.8
9	4	4	5	5	5	4.6
10	5	4	4	3	5	4.2
11	5	5	5	4	5	4.8
12	3	2	2	2	4	2.6
13	5	5	5	5	5	5
14	4	4	4	2	4	3.6
15	5	5	5	5	5	5
16	5	4	4	4	5	4.4
17	3	4	2	2	4	3
18	5	5	4	5	5	4.8
19	5	4	5	4	4	4.4
20	5	5	5	2	5	4.4
21	4	4	4	4	4	4
22	5	4	4	2	5	4
23	4	4	4	4	4	4
24	2	2	2	3	4	2.6
25	5	4	5	4	5	4.6
26	3	2	2	1	3	2.2
27	5	4	5	4	5	4.6
28	5	5	5	2	5	4.4
29	4	5	5	4	5	4.6
30	5	5	5	5	5	5
31	4	4	4	5	4	4.2
32	4	4	2	2	4	3.2
33	4	4	5	3	5	4.2
34	4	4	4	3	4	3.8
35	5	5	5	5	5	5
36	5	4	5	4	5	4.6
37	4	4	4	4	4	4
38	4	4	2	2	4	3.2
39	5	5	5	4	5	4.8
40	5	5	5	2	5	4.4
41	4	4	4	4	5	4.2
42	2	2	2	1	3	2
43	4	4	2	2	4	3.2
44	4	4	5	3	5	4.2
45	5	5	5	2	5	4.4
46	5	5	4	4	5	4.6
47	3	4	2	2	3	2.8
48	5	5	5	2	5	4.4
49	3	2	2	2	2	2.2
50	5	5	5	5	5	5
51	5	4	4	2	5	4
52	5	5	5	4	5	4.8
53	2	2	2	2	3	2.2
54	5	4	4	3	5	4.2

55	5	5	5	5	5	5
56	5	5	4	4	5	4.6
57	4	4	3	3	3	3.4
58	5	4	4	3	4	4
59	5	5	5	5	5	5
60	4	5	5	4	5	4.6
61	4	4	4	5	4	4.2
62	2	2	2	2	2	2
63	4	4	4	4	5	4.2
64	4	5	5	2	5	4.2
65	4	4	5	5	4	4.4
66	4	4	4	4	4	4
67	3	2	2	1	3	2.2
68	5	5	5	5	5	5
69	5	5	4	3	4	4.2
70	4	4	5	2	5	4
71	3	4	4	2	4	3.4
72	4	5	4	3	5	4.2
73	5	5	5	4	5	4.8
74	5	5	5	5	5	5
75	5	5	5	5	5	5
76	5	4	5	3	5	4.4
77	2	2	2	1	2	1.8
78	5	4	4	2	5	4
79	4	4	4	4	4	4
80	5	4	5	3	5	4.4
81	3	4	2	2	3	2.8
82	5	5	5	5	5	5
83	4	5	5	2	4	4
84	4	4	4	4	5	4.2
85	5	5	5	2	4	4.2
86	3	2	2	2	2	2.2
87	5	5	5	2	5	4.4
88	5	5	4	4	4	4.4
89	5	4	5	5	5	4.8
90	5	5	5	3	4	4.4
91	2	2	2	1	2	1.8
92	5	5	5	3	5	4.6
93	5	5	5	4	5	4.8
94	4	4	4	5	4	4.2
95	3	2	2	1	2	2
96	4	4	4	3	4	3.8
97	4	4	4	4	4	4
98	3	4	2	1	3	2.6
99	5	5	4	3	4	4.2
100	4	4	4	4	5	4.2
101	4	4	4	4	4	4
102	5	5	5	5	4	4.8
103	5	5	5	3	4	4.4

104	5	5	5	3	5	4.6
105	5	5	5	4	5	4.8
106	3	4	4	2	4	3.4
107	5	5	5	5	5	5
108	4	4	4	4	4	4
109	5	5	5	4	5	4.8
110	5	5	4	4	4	4.4
111	5	5	5	4	5	4.8
112	4	4	5	4	5	4.4
113	5	5	5	5	5	5
114	5	5	5	5	5	5
115	5	5	5	5	5	5
116	5	5	5	5	5	5
117	5	4	5	4	5	4.6
118	5	5	5	5	5	5
119	5	4	4	3	5	4.2
120	5	5	4	5	4	4.6
121	5	5	5	4	5	4.8
122	5	5	5	5	5	5

Kepercayaan Publik

	Kepercayaan Publik (X4)					
No	1	2	3	4	5	Mean
1	4	4	4	4	5	4.2
2	4	5	4	4	4	4.2
3	4	5	4	4	3	4
4	2	1	2	2	3	2
5	4	4	2	4	5	3.8
6	4	4	4	4	2	3.6
7	2	2	2	3	4	2.6
8	4	4	4	5	5	4.4
9	3	4	2	4	5	3.6
10	5	5	5	5	5	5
11	4	5	3	5	4	4.2
12	2	1	1	1	4	1.8
13	4	5	4	4	4	4.2
14	5	4	4	3	4	4
15	3	4	3	4	5	3.8
16	4	3	4	4	4	3.8
17	2	2	2	2	3	2.2
18	4	5	3	4	5	4.2
19	4	5	4	4	4	4.2
20	4	5	3	4	2	3.6
21	4	4	4	4	5	4.2
22	4	4	2	4	4	3.6
23	4	4	4	4	2	3.6
24	2	1	1	2	2	1.6
25	4	4	5	5	5	4.6

26	2	2	2	2	3	2.2
27	5	5	5	5	5	5
28	4	5	4	5	5	4.6
29	3	4	4	5	5	4.2
30	5	5	5	5	5	5
31	4	4	4	4	5	4.2
32	2	2	1	3	4	2.4
33	5	4	4	4	5	4.4
34	2	2	1	3	4	2.4
35	4	4	3	4	5	4
36	5	5	5	5	5	5
37	4	4	4	5	5	4.4
38	2	2	1	1	2	1.6
39	5	5	5	5	5	5
40	4	4	4	4	5	4.2
41	4	4	3	3	5	3.8
42	2	2	2	2	2	2
43	2	2	2	3	4	2.6
44	4	4	5	4	5	4.4
45	3	5	5	5	5	4.6
46	4	4	4	4	5	4.2
47	2	2	2	2	4	2.4
48	5	5	3	4	5	4.4
49	2	1	1	2	3	1.8
50	4	4	4	5	5	4.4
51	4	4	4	5	5	4.4
52	5	3	5	5	5	4.6
53	2	2	2	3	4	2.6
54	5	5	4	4	5	4.6
55	4	5	5	4	3	4.2
56	5	4	5	5	4	4.6
57	2	2	2	2	2	2
58	5	5	5	5	5	5
59	5	5	5	5	3	4.6
60	4	4	3	5	5	4.2
61	4	4	5	5	5	4.6
62	3	2	2	2	4	2.6
63	5	5	3	4	5	4.4
64	4	4	3	4	5	4
65	4	5	3	4	5	4.2
66	5	4	4	5	5	4.6
67	1	2	1	2	3	1.8
68	4	4	3	4	5	4
69	5	5	5	5	5	5
70	4	5	4	5	5	4.6
71	2	2	2	3	3	2.4
72	3	5	2	4	5	3.8
73	4	5	3	5	5	4.4
74	4	4	5	5	5	4.6

75	5	5	5	5	5	5
76	4	5	4	4	5	4.4
77	1	3	2	3	4	2.6
78	5	5	5	5	5	5
79	4	4	4	4	5	4.2
80	5	5	5	5	5	5
81	2	2	1	2	4	2.2
82	4	5	4	4	5	4.4
83	4	5	4	4	4	4.2
84	5	5	4	5	5	4.8
85	5	5	5	5	5	5
86	2	2	1	1	3	1.8
87	3	4	3	4	5	3.8
88	4	4	4	4	5	4.2
89	5	5	2	5	5	4.4
90	4	5	3	5	5	4.4
91	2	2	2	2	3	2.2
92	5	5	5	5	5	5
93	5	5	5	5	5	5
94	4	5	4	5	5	4.6
95	1	2	1	3	4	2.2
96	4	4	4	4	3	3.8
97	3	4	4	4	5	4
98	2	2	1	1	3	1.8
99	4	4	4	4	4	4
100	5	5	4	5	5	4.8
101	5	4	4	5	5	4.6
102	5	5	5	4	5	4.8
103	4	5	5	4	4	4.4
104	4	4	4	4	5	4.2
105	5	5	5	5	5	5
106	2	2	1	2	2	1.8
107	5	5	3	5	5	4.6
108	5	5	5	5	5	5
109	4	5	4	4	5	4.4
110	5	5	5	5	5	5
111	5	5	5	5	5	5
112	4	5	3	4	5	4.2
113	5	4	4	5	5	4.6
114	4	5	4	5	5	4.6
115	4	4	3	4	5	4
116	4	5	5	5	4	4.6
117	4	4	4	3	4	3.8
118	5	5	4	5	5	4.8
119	5	5	5	5	5	5
120	4	5	5	4	4	4.4
121	4	4	4	5	5	4.4
122	4	5	4	4	5	4.4

Perkembangan Infrastruktur

	Perkembangan Infrastruktur (X5)					
No	1	2	3	4	5	Mean
1	5	5	4	4	4	4.4
2	4	4	5	5	4	4.4
3	5	5	4	5	4	4.6
4	4	4	4	3	2	3.4
5	5	5	5	5	5	5
6	5	5	4	4	2	4
7	4	4	2	2	2	2.8
8	5	5	4	5	5	4.8
9	5	4	5	5	4	4.6
10	4	4	5	5	3	4.2
11	4	4	4	4	5	4.2
12	4	4	2	2	1	2.6
13	5	5	4	5	4	4.6
14	5	5	5	5	5	5
15	4	4	4	4	3	3.8
16	5	5	4	5	4	4.6
17	4	4	2	2	1	2.6
18	5	5	5	5	4	4.8
19	4	5	5	5	5	4.8
20	5	4	5	5	4	4.6
21	4	2	4	4	4	3.6
22	2	4	4	4	4	3.6
23	2	4	4	4	4	3.6
24	2	2	4	4	2	2.8
25	5	5	5	5	2	4.4
26	4	2	3	2	2	2.6
27	5	4	5	5	3	4.4
28	5	5	5	5	3	4.6
29	4	4	5	5	4	4.4
30	4	4	5	5	5	4.6
31	4	4	5	5	3	4.2
32	4	4	2	2	2	2.8
33	5	5	5	5	4	4.8
34	4	4	3	3	2	3.2
35	5	5	5	5	4	4.8
36	5	5	5	5	5	5
37	4	4	4	4	5	4.2
38	2	2	4	3	2	2.6
39	5	5	4	2	2	3.6
40	5	4	4	5	4	4.4
41	5	5	4	4	4	4.4
42	4	2	3	2	1	2.4
43	4	4	3	2	2	3
44	4	4	4	4	5	4.2
45	4	4	5	4	4	4.2

46	4	5	5	4	4	4.4
47	4	4	2	2	2	2.8
48	4	5	4	4	5	4.4
49	4	4	4	2	2	3.2
50	4	4	4	4	4	4
51	5	5	4	5	5	4.8
52	5	5	5	5	4	4.8
53	4	4	4	3	3	3.6
54	5	5	5	5	5	5
55	5	5	5	4	5	4.8
56	5	5	5	5	5	5
57	4	4	2	4	2	3.2
58	4	5	5	4	4	4.4
59	5	5	4	4	4	4.4
60	5	5	5	5	4	4.8
61	4	4	5	5	3	4.2
62	4	4	2	2	2	2.8
63	4	5	4	4	4	4.2
64	5	5	5	5	4	4.8
65	5	5	5	5	5	5
66	4	4	4	4	2	3.6
67	4	3	2	4	2	3
68	4	4	4	4	4	4
69	4	4	5	5	3	4.2
70	5	5	5	5	5	5
71	4	4	2	1	1	2.4
72	5	4	4	5	4	4.4
73	3	3	5	5	4	4
74	3	5	5	4	4	4.2
75	5	5	5	5	5	5
76	5	4	4	5	2	4
77	3	4	4	2	2	3
78	5	5	4	5	4	4.6
79	4	4	4	4	4	4
80	5	5	5	5	3	4.6
81	4	4	2	2	1	2.6
82	5	5	5	5	3	4.6
83	4	4	5	4	5	4.4
84	4	4	4	4	4	4
85	4	5	5	4	4	4.4
86	2	2	1	1	1	1.4
87	4	4	5	5	4	4.4
88	5	5	5	5	3	4.6
89	5	5	4	4	4	4.4
90	5	5	5	5	2	4.4
91	2	2	3	3	1	2.2
92	5	5	5	5	5	5
93	5	5	4	5	5	4.8
94	4	4	5	5	4	4.4

95	4	4	2	1	1	2.4
96	5	5	5	5	3	4.6
97	4	4	5	5	5	4.6
98	4	4	2	2	2	2.8
99	4	4	4	4	4	4
100	5	5	5	5	5	5
101	5	5	5	5	5	5
102	4	5	5	5	4	4.6
103	4	4	4	4	4	4
104	5	5	5	5	5	5
105	5	5	4	4	3	4.2
106	4	3	2	2	2	2.6
107	4	4	5	5	4	4.4
108	5	5	5	4	2	4.2
109	5	5	5	4	4	4.6
110	4	4	5	5	5	4.6
111	4	4	4	4	5	4.2
112	5	5	5	5	5	5
113	4	4	5	4	5	4.4
114	4	5	4	4	5	4.4
115	4	4	4	4	4	4
116	4	5	4	4	5	4.4
117	5	5	5	5	5	5
118	5	5	4	4	5	4.6
119	4	4	4	4	4	4
120	4	4	4	5	4	4.2
121	5	5	5	5	5	5
122	5	5	4	4	5	4.6

Lampiran 3 Hasil Uji Validitas

Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	TotalX1
X1.1	Pearson Correlation	1	.555**	.531**	.585**	.595**	.778**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122
X1.2	Pearson Correlation	.555**	1	.822**	.645**	.623**	.845**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122
X1.3	Pearson Correlation	.531**	.822**	1	.660**	.640**	.845**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122
X1.4	Pearson Correlation	.585**	.645**	.660**	1	.735**	.873**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122
X1.5	Pearson Correlation	.595**	.623**	.640**	.735**	1	.871**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	122	122	122	122	122	122
TotalX1	Pearson Correlation	.778**	.845**	.845**	.873**	.871**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	122	122	122	122	122	122

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Validitas Variabel Tingkat Penghasilan

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	TotalX2
X2.1	Pearson Correlation	1	.419**	.465**	.324**	.594**	.716**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122
X2.2	Pearson Correlation	.419**	1	.721**	.499**	.597**	.829**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122
X2.3	Pearson Correlation	.465**	.721**	1	.477**	.595**	.835**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122

X2.4	Pearson Correlation	.324**	.499**	.477**	1	.470**	.648**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122
X2.5	Pearson Correlation	.594**	.597**	.595**	.470**	1	.869**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	122	122	122	122	122	122
TotalX2	Pearson Correlation	.716**	.829**	.835**	.648**	.869**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	122	122	122	122	122	122

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	TotalX3
X3.1	Pearson Correlation	1	.826**	.785**	.537**	.754**	.886**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122
X3.2	Pearson Correlation	.826**	1	.769**	.524**	.716**	.872**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122
X3.3	Pearson Correlation	.785**	.769**	1	.613**	.806**	.917**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122
X3.4	Pearson Correlation	.537**	.524**	.613**	1	.547**	.780**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122
X3.5	Pearson Correlation	.754**	.716**	.806**	.547**	1	.869**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	122	122	122	122	122	122
TotalX3	Pearson Correlation	.886**	.872**	.917**	.780**	.869**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	122	122	122	122	122	122

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Validitas Variabel Kepercayaan Publik

Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	TotalX4
X4.1	Pearson Correlation	1	.833**	.812**	.809**	.583**	.921**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122
X4.2	Pearson Correlation	.833**	1	.765**	.828**	.588**	.917**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122
X4.3	Pearson Correlation	.812**	.765**	1	.795**	.499**	.893**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122
X4.4	Pearson Correlation	.809**	.828**	.795**	1	.678**	.933**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122
X4.5	Pearson Correlation	.583**	.588**	.499**	.678**	1	.736**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	122	122	122	122	122	122
TotalX4	Pearson Correlation	.921**	.917**	.893**	.933**	.736**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	122	122	122	122	122	122

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Validitas Variabel Perkembangan Infrastruktur

Correlations

		X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	TotalX5
X5.1	Pearson Correlation	1	.707**	.370**	.458**	.344**	.660**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122
X5.2	Pearson Correlation	.707**	1	.476**	.473**	.493**	.742**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122
X5.3	Pearson Correlation	.370**	.476**	1	.823**	.651**	.852**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122
X5.4	Pearson Correlation	.458**	.473**	.823**	1	.692**	.886**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000

	N	122	122	122	122	122	122
X5.5	Pearson Correlation	.344**	.493**	.651**	.692**	1	.838**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	122	122	122	122	122	122
TotalX5	Pearson Correlation	.660**	.742**	.852**	.886**	.838**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	122	122	122	122	122	122

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	TotalY
Y.1	Pearson Correlation	1	.711**	.718**	.642**	.655**	.845**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122
Y.2	Pearson Correlation	.711**	1	.677**	.747**	.797**	.914**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122
Y.3	Pearson Correlation	.718**	.677**	1	.608**	.629**	.809**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122
Y.4	Pearson Correlation	.642**	.747**	.608**	1	.745**	.877**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122
Y.5	Pearson Correlation	.655**	.797**	.629**	.745**	1	.891**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	122	122	122	122	122	122
TotalY	Pearson Correlation	.845**	.914**	.809**	.877**	.891**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	122	122	122	122	122	122

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 4 Hasil Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.892	5

Uji Reliabilitas Variabel Tingkat Penghasilan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.833	5

Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Pelayanan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.903	5

Uji Reliabilitas Variabel Kepercayaan Publik

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.927	5

Uji Reliabilitas Variabel Perkembangan Infrastruktur

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.853	5

Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.914	5

Lampiran 5 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		122
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.73004375
Most Extreme Differences	Absolute	.039
	Positive	.032
	Negative	-.039
Test Statistic		.039
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

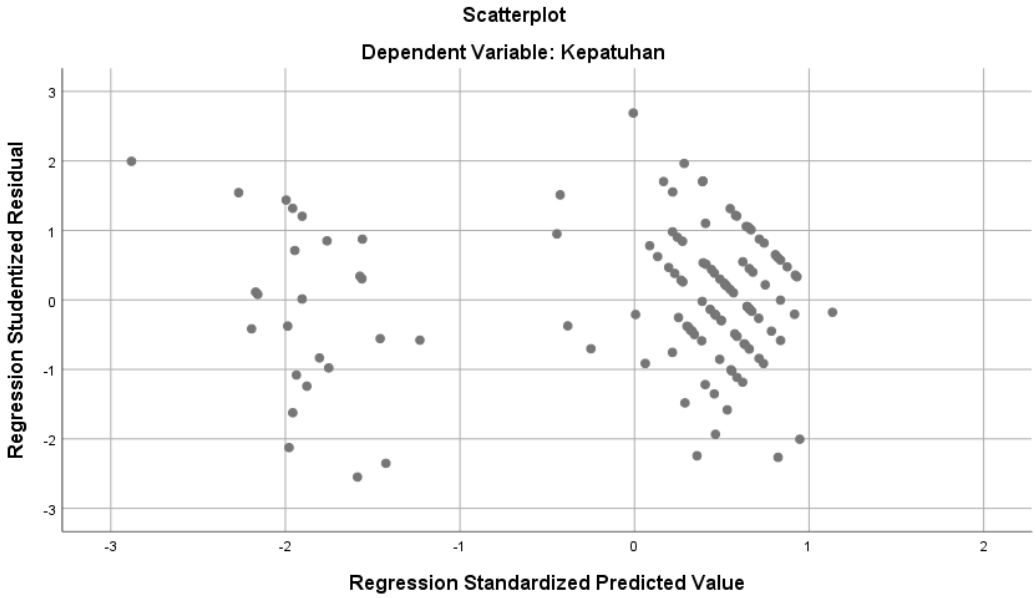
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Lampiran 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Lampiran 7 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1.986	1.041		-1.907	.059		
	Kesadaran	.363	.090	.313	4.024	.000	.193	5.178
	Penghasilan	.060	.078	.048	.767	.445	.304	3.290
	Pelayanan	.079	.082	.070	.964	.337	.225	4.453
	Kepercayaan	.329	.073	.347	4.517	.000	.198	5.059
	Infrastruktur	.261	.084	.219	3.115	.002	.238	4.210
	Pendidikan	.015	.206	.003	.072	.942	.672	1.488

a. Dependent Variable: Kepatuhan